



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA CIREBON



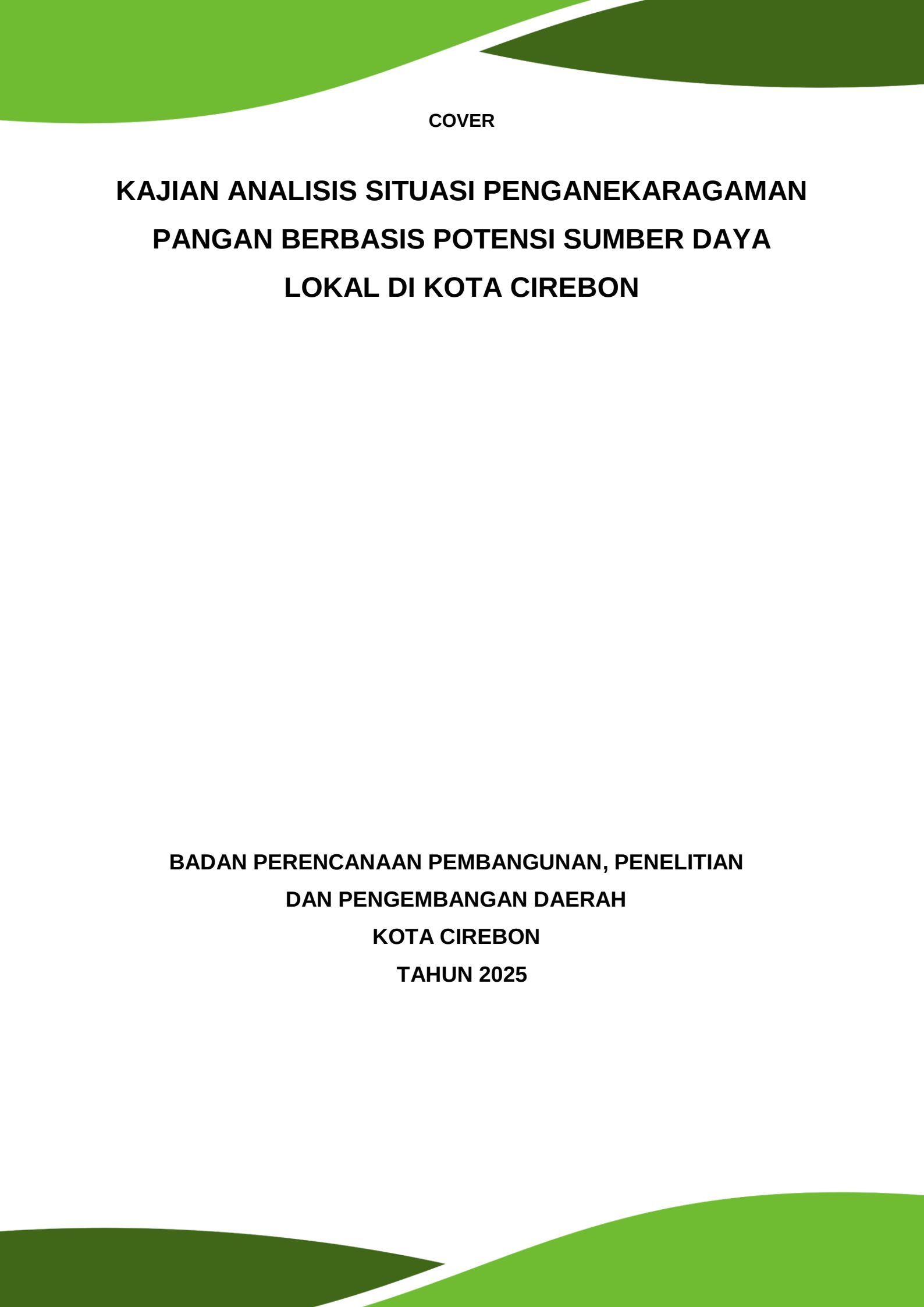
LAPORAN AKHIR

KAJIAN ANALISIS SITUASI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DI KOTA CIREBON

TAHUN 2025

BAPPELITBANGDA KOTA CIREBON

Jalan Monumen No. 1 Kota Cirebon
Telp. (0231) 203588
E-mail: bappelitbangda@cirebonkota.go.id
Website : bappeda.cirebonkota.go.id



COVER

**KAJIAN ANALISIS SITUASI PENGANEKARAGAMAN
PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA
LOKAL DI KOTA CIREBON**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan akhir Kajian Analisis Situasi Panganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Kota Cirebon ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun pada Tahun 2025 oleh Tim Kelitbangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang ketahanan dan panganekaragaman pangan.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ketersediaan pangan, pemenuhan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Cirebon dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal. Selain itu, kajian ini juga menganalisis daya dukung sumber daya alam, ekonomi, manusia, teknologi, serta aspek keberlanjutan lingkungan yang memengaruhi upaya panganekaragaman pangan di daerah.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta peran para pemangku kepentingan dalam mendukung panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah maupun rencana tata ruang wilayah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Akhir kata, Tim Kelitbangan Bappelitbangda Kota Cirebon menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini, baik melalui dukungan data, informasi, maupun masukan yang konstruktif. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pengambil kebijakan serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pangan Kota Cirebon yang beragam, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Cirebon, September 2025

Tim Kelitbangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	1
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 KELUARAN	3
1.5 RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
1.6 TEORI DAN LITERATUR REVIEW	5
BAB II METODOLOGI	21
2.1 JENIS PENELITIAN	21
2.2 METODE PENGUMPULAN DATA	21
2.3 METODE ANALISIS	21
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	23
3.1 KONDISI GEOGRAFI.....	23
3.2 KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	30
3.3 KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL KOTA CIREBON.....	33
3.4 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
4.1 KETERSEDIAAN PANGAN B2SA LOKAL	36
4.2 PEMENUHAN KONSUMSI B2SA LOKAL	37
4.3 DAYA DUKUNG SUMBER DAYA LOKAL	41
4.4 UPAYA DAN TANTANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN.....	51

4.5 PERAN STAKEHOLDER DIVERSIFIKASI PANGAN	56
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	69
5.1 KESIMPULAN	69
5.2 REKOMENDASI	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Susunan Pola Pangan Harapan Nasional	12
Tabel III.1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon Tahun 2024.....	23
Tabel III.2 Kondisi Topografi Kota Cirebon.....	24
Tabel III.3 Kondisi Kemiringan Kota Cirebon.....	25
Tabel III.4 Kondisi Geologi Kota Cirebon	26
Tabel III.5 Jenis Tanah Kota Cirebon	26
Tabel III.6 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C).....	27
Tabel III.7 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Cirebon (mm)	28
Tabel III.8 Curah Hujan Kota Cirebon Per-Kecamatan.....	28
Tabel III.9 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Cirebon	28
Tabel III.10 Penggunaan Lahan Kota Cirebon Tahun 2021.....	29
Tabel III.11 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023	33
Tabel IV.1 Indikator ketersediaan pangan Kota Cirebon Tahun 2019 - 2024	36
Tabel IV.2 Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi per kelompok pangan Tahun 2019 - 2024.....	38
Tabel IV.3 Kondisi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan.....	43
Tabel IV.4 Kondisi daya dukung sumber daya ekonomi.....	47
Tabel IV.5 Kondisi daya dukung sumber daya manusia.....	49
Tabel IV.6 Kondisi daya dukung teknologi	51
Tabel IV.7 Proporsi Peran Stakeholder Per Aspek Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Indikator IKA, IKU dan IKTL Kota Cirebon.....	32
Gambar III.2 IKLH Nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon	33
Gambar IV.1 Grafik tren ketersediaan pangan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2024...	37
Gambar IV.2 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel Harjamukti, Luas 51.986m ²	44
Gambar IV.3 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel. Argasunya, Luas 3.140m ²	44
Gambar IV.4 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel. Kalijaga, Luas 8.110 m ²	45
Gambar IV.5 Jenis Kelamin Responden.	57
Gambar IV.6 Pendidikan Terakhir Responden.....	57
Gambar IV.7 Tahun Kelahiran Responden berdasarkan Klasifikasi Generasi.	58
Gambar IV.8 Lama Keterlibatan Responden dengan Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.....	59
Gambar IV.9 Proporsi Peran Stakeholder dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Cirebon.....	60
Gambar IV.10 Pengetahuan Stakeholder terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Cirebon	61
Gambar IV.11 Keterlibatan Stakeholder dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.	62
Gambar IV.12 Pelibatan Stakeholder oleh Pemerintah Daerah dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	63
Gambar IV.13 Luas Kemitraan Stakeholder yang Terlibat dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	64
Gambar IV.14 Proporsi Stakeholder yang Menghadapi Kendala dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	65
Gambar IV.15 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Ketersediaan.....	66
Gambar IV.16 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Konsumsi	66
Gambar IV.17 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.	67
Gambar IV.18 Upaya Pemerintah dalam Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berdasarkan Persepsi Penerima Manfaat.....	68

Gambar V.1 Infografis rekomendasi hasil kajian	72
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media massa untuk dapat berhasil secara efektif. Berbagai upaya untuk percepatan program penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal telah dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan, kapasitas, ketersediaan sumber daya, maupun jejaring yang mereka miliki.

Kajian ini akan memetakan sejauhmana peran stakeholder dalam upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon. Dengan demikian, kajian ini dapat memberi bukti ilmiah mengenai beragam informasi yang terkait di antaranya, pihak mana yang paling dominan, pihak mana yang paling menghadapi kendala dalam aktivitasnya, kendala apa yang paling besar dihadapi oleh para pemangku kepentingan, serta pihak mana yang telah dilibatkan dan melibatkan pihak lainnya. Bukti ilmiah ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan lebih efektif dan strategis dalam upaya penganeekaragaman pangan lokal di Kota Cirebon pada masa mendatang.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan kajian ini adalah :

1. Menganalisis kondisi ketersediaan pangan di Kota Cirebon dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan B2SA sepanjang tahun berdasarkan potensi sumber daya lokal.
2. Mengevaluasi tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan B2SA masyarakat Kota Cirebon untuk mencapai sasaran skor PPH (Pola Pangan Harapan).
3. Mengidentifikasi daya dukung wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan aspek keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan penganeekaragaman pangan lokal.

4. Mengkaji upaya, program, kebijakan, serta hambatan dan tantangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang telah dilakukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
5. Menganalisis peran stakeholder (pentahelix) dalam mendukung penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal, termasuk tingkat kepentingan dan kontribusinya.
6. Merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon pada masa mendatang.

Adapun sasarannya adalah :

1. Tersedianya informasi dan analisis tentang kondisi ketersediaan pangan Kota Cirebon, mencakup kecukupan energi, protein, keragaman pangan, serta stabilitas pasokan sepanjang tahun.
2. Tersusunnya gambaran pemenuhan konsumsi pangan B2SA masyarakat dan capaian skor PPH, serta kesenjangan konsumsi dibandingkan standar ideal B2SA.
3. Tergambarnya daya dukung wilayah berupa ketersediaan SDA, SDM, ekonomi lokal, teknologi, dan aspek lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pangan lokal.
4. Terdokumentasikannya upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penganekaragaman pangan, termasuk identifikasi permasalahan, kendala, dan tantangan implementasi program.
5. Tersusunnya analisis peran stakeholder pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media) serta tingkat kontribusinya terhadap penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
6. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan strategi implementatif untuk penguatan penganekaragaman pangan lokal, meliputi arah kebijakan, program prioritas, dan langkah operasional untuk pembangunan pangan daerah.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan.

1.4 KELUARAN

Keluaran kegiatan ini adalah dokumen Kajian Analisis Situasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Di Kota Cirebon yang meliputi tahapan laporan:

1. Laporan Awal/Pendahuluan;
2. Laporan Antara;
3. Laporan Akhir;
4. Executive Summary;
5. Artikel hasil kajian sebagai bahan jurnal.

Sistematika penulisan laporan kajian memuat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; pada bab ini terdiri dari:

1. Latar Belakang;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Dasar Hukum;
4. Keluaran;
5. Ruang Lingkup Kegiatan;
6. Teori dan Literatur Review; dan

BAB II METODOLOGI; pada bab ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian;
2. Metode Pengumpulan Data;
Metode pengumpulan data mencakup pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder;
3. Metode Analisis;
Metode analisis yang dipilih dan digunakan untuk melihat keterkaitan antara data-data yang didapatkan secara primer dan sekunder.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA CIREBON

Gambaran umum terkait dengan kondisi eksisting sumber daya Kota Cirebon

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Ketersediaan Pangan B2SA Lokal
Kondisi ketersediaan Pangan di Kota Cirebon untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal di seluruh wilayah sepanjang tahun.
2. Pemenuhan Konsumsi B2SA dan PPH
Kondisi pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan B2SA untuk mencapai sasaran skor PPH dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal Kota Cirebon.
3. Daya Dukung Sumber Daya
Kondisi daya dukung sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan kelestarian lingkungan.
4. Upaya dan Tantangan Diversifikasi Pangan
Upaya yang telah dilakukan dan hambatan/tantangan dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat daerah maupun nasional.
5. Peran Stakeholder Diversifikasi Pangan
Peran stakeholder dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.

BAB V KESIMPILAN DAN REKOMENDASI

1.5 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- a. Menganalisis kondisi ketersediaan Pangan di Kota Cirebon untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal di seluruh wilayah sepanjang tahun.
- b. Menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan B2SA untuk mencapai sasaran skor PPH dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal Kota Cirebon.
- c. Menganalisis kondisi daya dukung
 - sumber daya alam,
 - sumber daya ekonomi,
 - sumber daya manusia,
 - teknologi, dan
 - kelestarian lingkungan.
- d. Menganalisis upaya yang telah dilakukan dan hambatan/tantangan dalam penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah di tingkat daerah maupun nasional.
- e. Menganalisis peran stakeholder dalam upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
- f. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian Kajian Analisis Situasi Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Cirebon.

1.6 TEORI DAN LITERATUR REVIEW

Penganeekaragaman Pangan

Dalam rangka penguatan sistem pangan nasional yang tangguh yang didukung oleh sistem pangan daerah, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi melalui penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kegiatan penguatan sistem pangan disebut dengan istilah penganeekaragaman pangan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal bahwa penganeekaragaman pangan didefinisikan sebagai upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Selanjutnya berkaitan dengan jenis

pangan Beragam , Bergizi Seimbang, dan Aman (Pangan B2SA) merupakan gabungan aneka pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Tujuan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat;
2. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas aneka Pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang merata dan terjangkau;
3. Meningkatkan pemanfaatan Pangan untuk memenuhi konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya lokal; dan
4. Mempercepat pengembangan usaha Pangan berbasis potensi sumber daya lokal, khususnya UMKM dan industri kecil menengah dengan meningkatkan peran pihak Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pelaku Usaha Pangan Lokal melalui fasilitasi dan peningkatan akses terhadap standar Pangan, teknologi, pendanaan, pasar, dan insentif berusaha.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pada Pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan dengan membudayakan pola konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Istilah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Pangan beragam artinya terdapat bermacam-macam jenis makanan, baik hewani maupun nabati, sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Makanan yang dikonsumsi harus beragam jenisnya karena tiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda sehingga kebutuhan gizi kita dapat terpenuhi. Bergizi artinya mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Seimbang artinya dikonsumsi secara cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan tetap memperhatikan proporsinya sesuai dengan Isi Piringku. Aman artinya

harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga proses pengolahan dan penyimpanan makanan harus dilakukan dengan baik.

Dilansir dari laman Badan Pangan Nasional, bahwa upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
2. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
3. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
4. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal. Promosi Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan berbagai metode melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, media sosial, maupun media luar ruang. Selain itu promosi dapat dilakukan melalui direct communication misalnya gerakan, kampanye, pameran, pilot project ataupun sarana percontohan, dan lain- lain.

Beberapa penelitian penelitian terdahulu yang membahas tentang penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal oleh pemerintah daerah antara lain misalnya terkait Implementasi Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kabupaten Sijunjung. Menurut Rahmat Hidayat dan Adil Mubarak (2019) dalam judul "Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) oleh Dinas Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung" menemukan bahwa program ini diatur melalui Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017. Meskipun pelaksanaannya berjalan baik secara umum, terdapat hambatan utama pada komunikasi langsung kepada masyarakat, dengan pendamping program hanya terdiri dari empat orang. Faktor pendukung mencakup komitmen kejujuran melalui pedoman pelaksanaan, sementara faktor penghambat meliputi kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga.

Selanjutnya pelaksanaan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Pekanbaru dalam Penelitian Wan Harnanda (2020) berjudul "Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)" menyatakan bahwa pelaksanaan program melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) belum optimal. Kendala utama terletak pada transmisi komunikasi yang kurang efektif serta ketidaktersediaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dalam dimensi struktur birokrasi. Hal ini menghambat pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan secara menyeluruh.

Sedangkan penelitian Novi Handian, Aan Anwar Sihabudin, dan Ii Sujai (2022) dalam "Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis" menjelaskan bahwa program P2L telah berjalan, tetapi masih dihadapkan pada berbagai masalah. Tantangan mencakup ketidakpastian keamanan lahan dan kurangnya pengepul hasil panen yang memadai. Meski demikian, inisiatif ini menunjukkan potensi dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk penganekaragaman pangan lokal.

Penelitian Devi Titania Diyono Putri (disebut sebagai Amalia Yunia Rahmawati, 2020) dalam "Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Sumbergondo Kota Batu" menemukan bahwa pendanaan kegiatan KRPL tidak berjalan optimal. Warga masih bergantung pada dana pribadi untuk mengembangkan program ini, yang membatasi skala dan keberlanjutan upaya diversifikasi. Penelitian ini menyoroti perlunya dukungan anggaran pemerintah daerah yang lebih kuat.

Penelitian Muhammad Habibi dan Arbainah Saidi (2023) dalam "Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari Sebagai Kebijakan Sosial Pencegah Stunting Sejak Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara" menyimpulkan bahwa kelompok wanita tani telah berhasil menjalankan misi pencegahan stunting melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Secara garis besar, program ini efektif dalam mempromosikan konsumsi pangan bergizi dari bahan lokal, meskipun memerlukan penguatan koordinasi antarstakeholder.

Melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, seperti melalui program P2KP, KRPL, dan P2L, telah berjalan meskipun belum optimal di berbagai daerah Indonesia. Hambatan umum meliputi komunikasi yang kurang efektif kepada masyarakat, ketiadaan SOP atau regulasi pendukung yang jelas, ketidakpastian keamanan lahan, minimnya pengepul hasil panen, serta pendanaan yang bergantung pada dana pribadi. Faktor sosial-ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, kepemilikan lahan, dan ukuran keluarga juga sering menjadi penghambat keberhasilan program.

Di sisi lain, komitmen melalui pedoman pelaksanaan dan keterlibatan kelompok masyarakat seperti wanita tani menunjukkan potensi besar, terutama untuk pencegahan stunting dan ketahanan pangan. Benang merahnya adalah perlunya penguatan koordinasi birokrasi, alokasi anggaran memadai, serta sinergi multi-stakeholder untuk meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat lokal.

A. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Ketersediaan pangan menggambarkan seberapa besar pangan (dalam jumlah dan jenis) yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam suatu wilayah dan periode tertentu.

Agar bermakna secara gizi, ketersediaan tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam ton atau kilogram, tetapi harus dikonversi menjadi zat gizi dan energi yang dapat dikonsumsi manusia. Zat gizi dan energi yang dikonsumsi oleh manusia dapat dinyatakan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau Protein (AKP) dan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKP menunjukkan sejauh mana ketersediaan satuan protein mampu memenuhi kebutuhan gizi penduduk, dan AKG menunjukkan sejauh mana ketersediaan energi pangan mampu memenuhi kebutuhan energi penduduk.

Produk pangan dihitung setelah dikurangi susut dan dikonversi ke edible portion. Nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) dihitung dari seluruh produk pangan sumber energi yang dikonsumsi manusia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau Angka Kecukupan Protein (AKP) dihitung dari seluruh produk pangan sumber protein dan zat gizi yang dapat dimakan.

Hubungan antara ketersediaan pangan dan Angka Kecukupan Protein atau Gizi dan Angka Kecukupan Energi adalah ketersediaan pangan dikonversikan menjadi nilai protein atau gizi dan nilai energi kemudian dibandingkan dengan nilai kebutuhan protein atau gizi dan energi sehingga menghasilkan Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE) dan Persentase Angka Kecukupan Protein (%AKP) atau Gizi (%AKG).

Berdasarkan Pedoman Badan Pangan Nasional (Bapanas), bahwa indikator ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal adalah :

1. Persentase Angka Kecukupan Energi (%AKE) terhadap ketersediaan pangan per kapita
2. Persentase Angka Kecukupan Protein (%AKP) atau Gizi (%AKG) terhadap ketersediaan pangan per kapita
3. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) terhadap ketersediaan pangan per kapita
4. Tonase produksi pangan setempat

Jika ketersediaan pangan tinggi dan beragam, maka nilai %AKE dan %AKG cenderung mendekati atau melebihi 100%. Sebaliknya, ketersediaan pangan yang rendah atau tidak berimbang akan menghasilkan %AKE dan/atau %AKG yang rendah. Persentase Angka Kecukupan Energi dan Persentase Angka Kecukupan Protein atau Gizi penting digunakan sebagai indikator ketersediaan pangan per kapita karena beberapa alasan, yaitu :

1. Mengaitkan pangan dengan kebutuhan biologis manusia

Ketersediaan pangan pada akhirnya bertujuan memenuhi kebutuhan energi dan gizi manusia, bukan sekadar menyediakan bahan pangan. %AKE dan %AKG langsung mengukur keterpenuhan kebutuhan tersebut.

2. Dapat dibandingkan lintas wilayah dan waktu

Indikator %AKE dan %AKG bersifat standar, sehingga:

- Dapat membandingkan antar kabupaten/kota/provinsi
- Dapat menilai tren dari tahun ke tahun

Ini sangat penting untuk perencanaan pangan dan evaluasi kebijakan.

3. Menggambarkan kualitas, bukan hanya kuantitas pangan

Dua wilayah bisa memiliki jumlah pangan yang sama, tetapi:

- Wilayah A didominasi karbohidrat
- Wilayah B seimbang karbohidrat dan protein

Nilai %AKE dan %AKG mampu menunjukkan ketidakseimbangan struktur pangan, yang tidak terlihat jika hanya menggunakan indikator tonase pangan.

4. Digunakan secara luas dalam kebijakan pangan dan gizi

Nilai %AKE dan %AKG merupakan indikator kunci dalam:

- Neraca Bahan Makanan (NBM)

- Analisis ketahanan pangan
- Penilaian kerawanan pangan dan gizi

Karena itu, indikator ini bisa menjadi jembatan antara sektor pangan dan sektor kesehatan/gizi. Oleh karena itu, indikator AKE dan AKG mencerminkan ketersediaan pangan riil per kapita, bukan sekadar produksi atau pasokan kasar.

B. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas dan keseimbangan struktur ketersediaan pangan di suatu wilayah berdasarkan kontribusi energi dari berbagai kelompok pangan. PPH Ketersediaan tidak hanya menilai apakah pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga menilai apakah jenis pangan yang tersedia telah beragam dan seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk. Oleh karena itu, PPH Ketersediaan menjadi indikator penting dalam analisis ketersediaan pangan yang berorientasi pada pemenuhan konsumsi pangan yang sehat.

PPH Ketersediaan disusun berdasarkan konsep pola pangan ideal yang mencerminkan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pola ideal tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan, seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, minyak dan lemak, serta gula. Komposisi ini menjadi acuan untuk menilai apakah struktur ketersediaan pangan suatu wilayah masih didominasi oleh satu kelompok pangan tertentu atau sudah mendekati struktur pangan yang dianjurkan.

Dalam konteks ketersediaan pangan, PPH dihitung menggunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM menggambarkan jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi setelah memperhitungkan produksi, impor, ekspor, perubahan stok, serta pengurangan untuk benih, pakan, industri non-pangan, dan susut. Data pangan yang tersedia tersebut kemudian dikonversi menjadi energi (kilokalori) per kapita per hari sebagai dasar penghitungan PPH Ketersediaan.

Langkah awal dalam perhitungan PPH Ketersediaan adalah menentukan total energi pangan yang tersedia per kapita per hari. Selanjutnya, energi tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok pangan PPH sesuai dengan jenis komoditasnya.

Setelah itu dihitung persentase kontribusi energi masing-masing kelompok pangan terhadap total energi yang tersedia. Persentase ini mencerminkan struktur ketersediaan pangan aktual di wilayah yang dianalisis.

Tahap berikutnya adalah membandingkan persentase energi aktual setiap kelompok pangan dengan persentase energi ideal sesuai standar PPH. Selisih antara kondisi aktual dan kondisi ideal menunjukkan tingkat ketidakseimbangan struktur ketersediaan pangan. Berdasarkan selisih tersebut, dihitung skor PPH untuk setiap kelompok pangan dengan menggunakan bobot tertentu, di mana semakin kecil deviasi dari pola ideal, semakin tinggi skor yang diperoleh.

Skor PPH Ketersediaan total diperoleh dengan menjumlahkan skor seluruh kelompok pangan. Nilai skor ini berada pada rentang 0 hingga 100, di mana nilai yang semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa struktur ketersediaan pangan semakin beragam dan seimbang dengan masing-masing skor maksimal pada kelompok pangan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sebaliknya, skor yang rendah menunjukkan adanya ketimpangan struktur pangan, seperti dominasi berlebihan padi-padian atau rendahnya ketersediaan pangan sumber protein serta sayur dan buah.

Tabel 1.1 Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40,0 – 60,0	289	1050	50,0	0,5	25,0
2.	Umbi-umbian	0,0 – 8,0	105	126	6,0	0,5	2,5
3.	Pangan Hewani	5,0 – 20,0	157	252	12,0	2,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0 – 15,0	21	210	10,0	0,5	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,0 – 3,0	11	63	3,0	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	2,0 – 10,0	37	105	5,0	2,0	10,0
7.	Gula	2,0 – 15,0	31	105	5,0	0,5	2,5
8.	Sayur dan Buah	3,0 – 8,0	262	126	6,0	5,0	30,0
9.	Aneka bumbu dan bahan minuman	0,0 – 5,0	-	63	3,0	0,0	0,0
Jumlah				2100	100,0	-	100,0

Sumber: *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan (2019)

Fungsi utama PPH Ketersediaan adalah sebagai indikator mutu ketersediaan pangan. Indikator ini mampu menunjukkan sejauh mana ketersediaan pangan di suatu wilayah telah mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan B2SA. Selain itu, PPH Ketersediaan berfungsi sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi

kelompok pangan yang ketersediaannya masih kurang atau justru berlebihan, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan pangan yang lebih tepat sasaran.

PPH Ketersediaan memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator ketersediaan pangan lainnya, seperti Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Gizi atau Protein (AKG/AKP). AKE dan AKG menggambarkan kecukupan pangan dari sisi kuantitas energi dan zat gizi, sedangkan PPH Ketersediaan melengkapi analisis tersebut dengan menilai keseimbangan dan keragaman sumber pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan yang ideal adalah ketersediaan yang cukup secara jumlah sekaligus seimbang secara struktur.

Dengan menggunakan PPH Ketersediaan, analisis ketersediaan pangan menjadi lebih komprehensif karena mampu mengaitkan antara potensi sumber daya pangan, struktur pasokan pangan, dan arah perbaikan pola konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, PPH Ketersediaan menjadi indikator strategis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan daerah, khususnya dalam mendukung penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

C. Produksi Pangan Setempat

Produk pangan setempat merupakan cerminan langsung dari kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan bagi penduduknya secara berkelanjutan. Dalam konsep ketahanan pangan, ketersediaan pangan tidak hanya diartikan sebagai kecukupan pangan secara nasional, tetapi juga kemampuan wilayah untuk memastikan pangan tersedia secara fisik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan produk pangan lokal menjadi indikator penting dalam menilai ketersediaan pangan di tingkat daerah.

Produk pangan setempat menggambarkan pasokan riil yang paling mudah diakses oleh masyarakat karena berasal dari produksi lokal, hasil perikanan setempat, atau olahan berbasis bahan baku lokal. Pangan lokal cenderung tersedia lebih stabil karena tidak sepenuhnya bergantung pada sistem distribusi antardaerah atau impor. Dengan demikian, semakin besar kontribusi produk pangan setempat terhadap pasokan pangan wilayah, semakin kuat tingkat ketersediaan pangan daerah tersebut.

Dalam analisis teknis ketersediaan pangan, produk pangan setempat dapat diukur secara kuantitatif melalui Neraca Bahan Makanan (NBM). Produksi pangan lokal dikonversi menjadi energi (kkal) dan protein (gram) per kapita per hari untuk menghitung Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). Kontribusi pangan lokal terhadap AKE dan AKP menunjukkan sejauh mana kebutuhan energi dan gizi penduduk dapat dipenuhi dari sumber daya pangan setempat.

Selain kuantitas, produk pangan setempat juga mencerminkan kualitas struktur ketersediaan pangan. Keberagaman jenis pangan lokal—seperti umbi-umbian, ikan, kacang-kacangan, sayur, dan buah lokal—akan memperbaiki keseimbangan distribusi energi antar kelompok pangan. Hal ini tercermin dalam nilai Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, di mana semakin beragam sumber pangan lokal yang tersedia, semakin mendekati pola pangan ideal dan semakin tinggi skor PPH.

Produk pangan setempat juga menjadi indikator ketahanan ketersediaan pangan karena berkaitan dengan tingkat ketergantungan wilayah terhadap pasokan luar daerah. Wilayah yang ketersediaan pangannya didominasi produk luar lebih rentan terhadap gangguan distribusi, fluktuasi harga, dan krisis pasokan. Sebaliknya, wilayah yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangannya dari produk lokal menunjukkan daya dukung pangan yang lebih kuat dan stabil.

Dalam konteks pembangunan pangan daerah, indikator berbasis produk pangan setempat memiliki nilai strategis karena bersifat spesifik wilayah dan relevan dengan kebijakan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pengembangan pertanian, perikanan, dan pangan lokal, sekaligus menjadi dasar perencanaan intervensi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan masyarakat.

Dengan demikian, produk pangan setempat tidak hanya berfungsi sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga sebagai indikator kunci ketersediaan pangan yang mencerminkan aspek kuantitas, kualitas, keberlanjutan, dan kemandirian pangan daerah. Integrasi indikator pangan lokal dalam analisis ketersediaan pangan memberikan gambaran yang lebih utuh dan realistis mengenai kondisi pangan wilayah, serta mendukung perumusan kebijakan pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

D. Potensi Sumber Daya Lokal

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan strategi yang mencakup optimalisasi lahan, penguatan industri UMKM, dan peningkatan teknologi untuk keberlanjutan. Teori daya dukung lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 dan konsep pembangunan berkelanjutan (Soubbotina, 2004), mendefinisikan identifikasi daya dukung wilayah sebagai kemampuan ekosistem mendukung populasi melalui perbandingan *supply-demand* SDA, SDM, ekonomi, dan teknologi, termasuk untuk pangan lokal. Pendekatan ini diterapkan dalam analisis daya dukung pertanian untuk ketahanan pangan berkelanjutan, yang mempertimbangkan faktor geografis, populasi, dan teknologi.

1. Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam pada upaya penganekaragaman pangan lokal merujuk pada kemampuan lingkungan dan sumber daya alam suatu wilayah untuk mendukung produksi dan penyediaan pangan secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistemnya. Daya dukung ini meliputi aspek kemampuan fisik lahan, ketersediaan air, dan kualitas lingkungan yang memungkinkan pertanian pangan lokal berkembang tanpa merusak sumber daya tersebut. (Badan Pangan Nasional)

Indikator utama meliputi luas lahan produktif (sawah, tegalan), kualitas tanah (jenis alluvial, grumosol; kandungan hara seperti C-organik), dan produktivitas per hektar (minimal 3 ton/ha/tahun untuk padi). Ketersediaan air (irigasi, DAS), curah hujan, dan kemiringan lereng juga dievaluasi untuk mendukung produksi pangan lokal seperti jagung atau ubi.

Indikator pada perkotaan :

1. Lahan potensial;
2. Lahan pekarangan;
3. Ketersediaan pengairan untuk lahan potensial.

4. Sumber Daya Ekonomi

Daya dukung sumber daya ekonomi pada upaya penganekaragaman pangan lokal adalah kemampuan aspek ekonomi dalam suatu wilayah untuk mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal secara berkelanjutan. Ini

mencakup ketersediaan modal, infrastruktur, akses pasar, harga pangan yang terjangkau, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. (DOI: 10.18343/jipi.25.1.73)

Indikator mencakup produksi komoditas unggulan (rasio Location Quotient >1 untuk jagung, kedelai), nilai tukar petani, dan potensi ekspor ke daerah lain. Infrastruktur seperti jalan arteri, pelabuhan, dan distribusi pangan olahan UMKM diukur untuk efisiensi ekonomi pangan lokal.

Indikator pada perkotaan :

A. Ketersediaan modal (pendanaan diversifikasi pangan)

1. Sumber modal
2. Institusi penyedia permodalan
3. Anggaran pemerintah

B. Infrastruktur

1. Panjang dan kualitas jalan
2. Jaringan telekomunikasi
3. Ketersediaan air bersih
4. Ketersediaan akses listrik
5. Sanitasi dan kesehatan

C. Keterjangkauan harga pangan

1. Fluktuasi harga kelompok pangan
2. Stabilitas harga pangan
3. Proporsi harga pangan terhadap pendapatan minimal

D. Kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya

1. UKM pengolah pangan lokal
2. Kelompok tani

5. Sumber Daya Manusia

Daya dukung sumber daya manusia pada upaya penganeekaragaman pangan lokal adalah kemampuan dan kesiapan tenaga kerja serta masyarakat dalam mengelola, memproduksi, mengembangkan, dan memanfaatkan pangan lokal secara efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, motivasi,

serta kesadaran akan pentingnya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. (Badan Pangan Nasional)

Indikator utama adalah jumlah penduduk maksimal yang ditopang (misalnya 1,6 juta jiwa berdasarkan lahan sawah abadi), tingkat pendidikan (minimal SLTP untuk industri), dan proyeksi pertumbuhan populasi geometris. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM: 2100 kalori/kapita/hari) digunakan untuk menilai kemampuan wilayah memenuhi pangan penduduk.

Indikator pada perkotaan :

A. Pengetahuan

1. SDM penyuluh pertanian
2. Pendamping atau kader kelompok tani

B. Keterampilan

1. Kegiatan pelatihan mendukung diversifikasi pangan lokal

C. Motivasi dan kesadaran

1. Masyarakat anggota kelompok tani
2. Kegiatan pelatihan kader kelompok tani
3. Kegiatan pelatihan/sosialisasi/kampanye diversifikasi pangan sumber daya lokal

6. Teknologi

Daya dukung teknologi pada upaya penganeekaragaman pangan lokal adalah kemampuan dan kesiapan teknologi yang tersedia untuk mendukung seluruh proses pengembangan, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran pangan lokal. Teknologi ini mencakup inovasi teknologi tepat guna yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, ketersediaan, dan daya saing produk pangan lokal di pasar.

Indikator meliputi produktivitas lahan (panen/tahun), teknologi pertanian (irigasi modern, intensifikasi), dan pengembangan sistem insentif untuk UMKM pangan lokal. Akses listrik, telekomunikasi, dan alat produksi dievaluasi untuk mendukung diversifikasi seperti pengolahan sagu atau hanjeli.

Indikator pada perkotaan :

1. Teknologi pangan yang sudah diterapkan
2. Penelitian dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal
3. Kajian rantai pasok pangan berbasis pangan lokal prototipe B2SA

7. Kelestarian Lingkungan

Daya dukung kelestarian lingkungan pada upaya penganeekaragaman pangan lokal adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal tanpa merusak ekosistem dan sumber daya alam yang ada. Hal ini meliputi pemeliharaan kualitas tanah, ketersediaan air, keanekaragaman hayati, serta keseimbangan ekosistem agar produksi pangan dapat terus berjalan secara lestari dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penganeekaragaman pangan lokal juga mendukung peningkatan keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya alam, yang pada akhirnya memperkuat sistem pangan lokal yang tangguh dan berkelanjutan.

Indikator mencakup rasio daya dukung (DDSDA >1 untuk surplus pangan), perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan pencegahan alih fungsi lahan. Faktor seperti stabilitas produksi terhadap banjir/kekeringan, keseimbangan supply-demand, serta integrasi dengan RTRW memastikan generasi mendatang terpenuhi tanpa degradasi.

B. Stakeholder Analysis

Stakeholder analysis (analisis pemangku kepentingan) adalah pendekatan sistematis untuk memahami karakteristik, kepentingan, dan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu kebijakan atau program. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk menggali informasi tentang aktor-aktor terkait, sehingga dapat diketahui perilaku, niat, hubungan, agenda, serta kepentingan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan dalam proses kebijakan (Brugha & Varvasovszky, 2000). Informasi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dalam melibatkan para pemangku kepentingan, memfasilitasi implementasi kebijakan, ataupun menilai konteks kebijakan dan kelayakan arah kebijakan di masa mendatang. Dengan kata lain, analisis stakeholder membantu mengidentifikasi siapa saja aktor kunci yang harus dilibatkan serta bagaimana mengarahkan dukungan mereka demi tercapainya tujuan program atau kebijakan.

Berkembang dari disiplin ilmu politik dan manajemen, metode analisis stakeholder kini diadopsi secara luas di berbagai bidang sebagai alat pendukung pengambilan keputusan. (Bendtsen et al., 2021) dalam tinjauannya menemukan bahwa stakeholder analysis banyak diterapkan dalam konteks manajemen

lingkungan dan regulasi, terutama digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami para pemangku kepentingan, serta alat penting untuk melibatkan para stakeholder atau hambatan yang terkait. Sejumlah teknik dan pendekatan telah dikembangkan dalam analisis stakeholder, misalnya dengan memetakan kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) setiap aktor atau menganalisis jejaring hubungan antar-stakeholder.

Reed et al. (2009) mengklasifikasikan berbagai metode analisis stakeholder ke dalam tipe-tipe yang berbeda sesuai tujuan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, mulai dari metode partisipatif penuh hingga analisis berdasarkan data peneliti, yang menunjukkan adanya variasi pendekatan mulai dari pemetaan atribut tiap aktor hingga analisis relasi dan jaringan antar aktor. Terlepas dari ragam metodenya, tujuan umum analisis stakeholder adalah mengidentifikasi aktor yang relevan dan memahami peran relatif mereka.

Analisis stakeholder dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan strategis dan implementasi kebijakan. Penggunaan teknik analisis stakeholder secara bijak dapat membantu memformulasikan isu atau masalah ke dalam bentuk yang dapat dipecahkan secara teknis dan dapat diterima secara politis, sehingga upaya penyelesaian yang diambil dapat memajukan kebaikan bersama (Bryson, 2018). Artinya, analisis stakeholder memungkinkan perumusan strategi yang dapat dilaksanakan secara teknis sekaligus dapat diterima oleh berbagai pihak, karena mempertimbangkan kepentingan dan kekhawatiran setiap kelompok sejak awal. Untuk itu, keterlibatan para pemangku kepentingan kunci perlu direncanakan secara matang.

Model kolaborasi multi-stakeholder seperti kerangka pentahelix kerap dijadikan acuan dalam pembangunan, di mana lima unsur pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi/ perguruan tinggi, pelaku usaha/ sektor swasta, komunitas/ masyarakat, dan media) terlibat secara sinergis dalam mencapai sasaran bersama (Mananda et al., 2025).

Bukti dari Indonesia dan berbagai konteks di negara-negara Global Selatan menunjukkan bahwa kolaborasi model Helix memiliki potensi sekaligus tantangan. Potensi tersebut mencakup legitimasi yang lebih luas, keberagaman ide, dan percepatan difusi inovasi. Namun demikian, berbagai studi juga mencatat adanya friksi, seperti tingginya biaya koordinasi dan kesenjangan kapasitas antar pemangku

kepentingan (Ayala-Orozco et al., 2018; Basyar et al., 2025; Novianti, 2020; Wang & Ran, 2018).

Penting untuk dicatat bahwa adopsi kerangka Helix bukan tanpa asumsi. Sejumlah penelitian mendokumentasikan adanya asimetri kekuasaan, pengaruh media dalam membentuk agenda, serta hambatan implementasi yang berpotensi membungkam suara komunitas atau memperlambat proses pengambilan keputusan apabila tidak terdapat mekanisme pengaman (Marinescu et al., 2021). Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan polisentris, seperti kejelasan peran, akuntabilitas, dan transparansi data, serta pentingnya peran aktor perantara (intermediaries) untuk menjaga keselarasan tujuan dan proses pembelajaran kolektif (Baggio & Fuchs, 2018; Calzada, 2020; Dragomir et al., 2020). Meskipun kerangka pentahelix secara luas diakui sebagai pendekatan yang mendorong kolaborasi multi-pemangku kepentingan, sejumlah studi juga mencatat keterbatasannya dalam praktik. Calzada (2020) misalnya, mengemukakan bahwa kolaborasi Penta-Helix berisiko mereproduksi hierarki kekuasaan yang sudah ada, di mana aktor dari sektor pemerintah maupun dunia usaha kerap mendominasi proses pengambilan keputusan. Selain itu, inersia institusional dan kejenuhan stakeholder juga dapat menghambat koordinasi jangka panjang dan proses pembelajaran bersama.

BAB II METODOLOGI

2.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kota Cirebon. Subjek penelitian adalah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon. Untuk memastikan keterwakilan, responden mencakup perwakilan dari unsur pemerintah (perangkat daerah terkait pangan), akademisi (perguruan tinggi), pelaku usaha (pengusaha UMKM dan industri pengolahan pangan lokal), kelompok masyarakat (termasuk petani atau kelompok tani pangan lokal), serta media massa yang bersirkulasi di Kota Cirebon.

2.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Pemilihan responden dilakukan secara purposif dari masing-masing kelompok *stakeholder* dengan kriteria partisipan yang dianggap memahami dan/atau terlibat langsung dalam program penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para responden kunci dari masing-masing kategori stakeholder. Setiap wawancara berlangsung sekitar 30-60 menit, dengan panduan pertanyaan terbuka seputar kondisi eksisting, ketersediaan sumber daya, kebijakan/program/kegiatan yang telah dilaksanakan, pengetahuan terhadap kebijakan terkait, keterlibatan, pelibatan oleh pemerintah, kendala yang dihadapi dan pandangan responden mengenai upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon.

Wawancara direkam dengan persetujuan responden, kemudian ditranskripsi verbatim untuk keperluan analisis dan ditabulasi dalam bentuk tabel. Selain itu, data sekunder berupa dokumen kebijakan dan laporan program terkait penganeekaragaman pangan turut dikaji untuk memberikan konteks dan melengkapi informasi hasil wawancara.

2.3 METODE ANALISIS

Pendekatan analisis tematik digunakan untuk mengolah data kualitatif yang terkumpul. Proses analisis mengikuti langkah-langkah: (1) membaca dan menelaah

transkrip secara cermat, (2) memberi kode (*coding*) pada unit-unit teks yang relevan dengan topik penelitian, dan (3) mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan kombinasi koding deduktif (berdasarkan kerangka awal seperti kategori *stakeholder* dan aspek panganekaragaman pangan) dan koding induktif (berdasarkan pola yang muncul dari data secara spontan).

Perangkat lunak NVivo 12 digunakan untuk membantu proses pengorganisasian data kualitatif tersebut. Dengan NVivo, peneliti membuat *node* atau kategori kode untuk setiap tema yang dikaji (*“pengetahuan kebijakan”*, *“keterlibatan”*, *“pelibatan oleh pemerintah”*, *“kendala”* untuk aspek peran stakeholder; serta *“ketersediaan”*, *“konsumsi”*, *“B2SA”* untuk aspek panganekaragaman pangan), dengan *cases* yang diteliti (*“pemerintah”* (perangkat daerah terkait pangan), *“akademisi”* (perguruan tinggi), *“pelaku usaha”* (pengusaha UMKM dan industri pengolahan pangan lokal), *“kelompok masyarakat”* (termasuk petani atau kelompok tani pangan lokal), serta *“media massa”*). Setiap segmen pernyataan responden yang relevan diberi kode ke *node* dan *cases* terkait.

Selanjutnya, NVivo membantu menghitung kepadatan kode (*code density*) atau frekuensi kemunculan kode tertentu yang dikaitkan dengan masing-masing kategori *stakeholder*. Melalui teknik ini, diperoleh indikasi proporsi kontribusi setiap kelompok *stakeholder* terhadap tema tertentu. Hasil analisis tematik divisualisasikan dalam bentuk matriks dan grafik (menggunakan output *query* NVivo) untuk membandingkan peran antar-stakeholder pada berbagai aspek. Terakhir, temuan kualitatif tersebut diinterpretasi dan dihubungkan dengan kerangka konseptual dan konteks kebijakan guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 KONDISI GEOGRAFI

Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Secara geografis, titik nol Kota Cirebon terletak pada koordinat 6° 43' 10.5" Lintang Selatan dan 108° 34' 18.7" Bujur Timur. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat pada koordinat 108° 31' 05.63105" Bujur Timur ±7,96 kilometer ke arah timur hingga koordinat 108°35' 24.04215" Bujur Timur dan dari utara dimulai dari koordinat 06° 47' 46.99245" Lintang Selatan ke arah selatan ±11,9 kilometer hingga koordinat 06°41'27.17520" Lintang Selatan. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi seluas 3.946,60 Ha. Kota Cirebon terbagi kedalam lima kecamatan dengan luas wilayah dan persentase terhadap luas kota yang berbeda, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.1 berikut:

Tabel III.1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap luas Kota (%)
1	HARJAMUKTI	1.760,2	44,60%
2	KEJAKSAN	444,1	11,25%
3	KESAMBI	865,3	21,93%
4	LEMAHWUNGKUK	718,5	18,21%
5	PEKALIPAN	158,5	4,02%
Kota Cirebon		3.946,6	100,00%

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Sesuai Keputusan Menteri dalam Negeri RI nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau terbaru sehingga sejak peraturan tersebut ditetapkan, luas wilayah Kota Cirebon menjadi 39,466 km². Secara administrasi Wilayah Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, dengan batas wilayah administrasi yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon

Kota Cirebon terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat sejauh 130 km dari arah Kota Bandung dan 258 km dari arah Kota Jakarta. Wilayah Kota Cirebon dibatas oleh Sungai Kedung Pane di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah timur, Sungai Kalijaga di sebelah selatan, dan Sungai Banjir Kanal di sebelah barat.

Luas wilayah Kota Cirebon mencapai 37,36 kilometer persegi dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32 persen) dan tanah pertanian (38 persen). Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-2000 di atas permukaan laut (dpl), sementara kemiringan lereng antara 0-40 persen dimana 0-3 persen merupakan daerah berkarateristik kota, 3-25 persen daerah transmisi dan 25-40 persen merupakan pinggiran.

A. Topografi dan Kemiringan

Topografi menjabarkan mengenai kondisi morfologi, ketinggian dan kelerengan wilayah. Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-136 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian ± 136 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Jelasnya mengenai klasifikasi ketinggian di wilayah Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut.

Tabel III.2 Kondisi Topografi Kota Cirebon

Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian (Ha)			Total
	0-50 mdpl	50-100 mdpl	100-136 mdpl	
Kec. Harjamukti	1.394,31	287,59	78,45	1.760,2
Kec. Kejaksan	444,1			444,1
Kec. Kesambi	865,3			865,3
Kec. Lemahwungkuk	718,5			718,5
Kec. Pekalipan	158,5			158,5
Kota Cirebon	3.580,71	287,59	78,45	3.946,6

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Dilihat dari Tabel III.2 diatas, kondisi topografi yang berada di Kota Cirebon hampir seluruhnya memiliki topografi di 0-50 mdpl dengan luasan yang paling luas berada di Kecamatan Harjamukti yaitu seluas 1.394,31 Ha, sedangkan pada ketinggian 50-100 mdpl hanya berada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan seluas 287,59 Ha dan untuk ketinggian 100-136 mdpl berada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan 78,45 Ha. Sedangkan untuk kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3 Kondisi Kemiringan Kota Cirebon

Kecamatan	Klasifikasi Kemiringan Lereng (%)			Total
	0-2 %	2-15 %	15-25 %	
Kec. Harjamukti	1.254,96	338,59	166,65	1.760,2
Kec. Kejaksan	444,1			444,1
Kec. Kesambi	865,3			865,3
Kec. Lemahwungkuk	718,5			718,5
Kec. Pekalipan	158,5			158,5
Kota Cirebon	3.441,36	338,59	166,65	3.946,6

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Dilihat dari Tabel diatas, kondisi Kemiringan yang berada di Kota Cirebon hampir seluruhnya memiliki kemiringan di 0-2% dengan luasan yang paling luas berada di Kecamatan Harjamukti yaitu 1.254,96 Ha, sedangkan pada kemiringan 2-15% hanya berada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan seluas 338,59 Ha dan untuk kemiringan 15-25% berada di Kecamatan Harjamukti dengan luasan 166,64 Ha.

B. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi di Kota Cirebon terbagi menjadi 3 kelompok yaitu alluvial dan endapan kuarter, batuan sedimen plio – plistosen dan batuan gunung api kuarter. Struktur geologi yang mendominasi yaitu pada kelompok alluvial dan endapan kuarter seluas 2.928,73 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. Sedangkan kelompok batuan sedimen plio – plistosen hanya seluas 1.007,66 Ha, terdapat di Kecamatan Harjamukti dan Kejaksan. Dan kelompok batuan gunung api kuarter hanya seluas 10,91, terdapat di Kecamatan Kesambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.4 mengenai peta tentang kondisi geologi.

Tabel III.4 Kondisi Geologi Kota Cirebon

Kecamatan	Geologi (Ha)			Total
	Aluvial dan Endapan Kuartar	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	Batuan Gunungapi Kuartar	
Kec. Harjamukti	800,86	959,49		1.760,2
Kec. Kejaksan	442,93			444,1
Kec. Kesambi	806,23	48,17	10,91	865,3
Kec. Lemahwungkuk	718,94			718,5
Kec. Pekalipan	159,76			158,5
Kota Cirebon	2.928,73	1.007,66	10,91	3.946,6

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tanah regosol yang berasal dari endapan lava dan proklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil). Ketersediaan air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut karena lokasi Kota Cirebon berada di pesisir pantai utara sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan minum sebagian besar bersumber dari pasokan PDAM Kota Cirebon yang mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan. Kota ini dilalui oleh beberapa sungai di antaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga.

Sebagaimana jenis tanah di Kota Cirebon secara umum relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. Jenis tanah yang mendominasi di Kota Cirebon yaitu Alluvial seluas 2.560,25 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. Tanah alluvial merupakan tanah endapan yang dibentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Jenis tanah alluvial banyak terdapat di datara rendah, disekitar muara sungai, rawa, lembah maupun kanan kiri aliran sungai besar. Tanah alluvial banyak mengandung pasir dan liat serta tidak banyak mengandung unsur unsur zat hara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut.

Tabel III.5 Jenis Tanah Kota Cirebon

Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)			Total
	Alluvial	Grumsol	Latosol	
Kec. Harjamukti	625,41	801,85	333,10	1.760,35
Kec. Kejaksan	442,93	0,00	0,00	442,93
Kec. Kesambi	613,21	252,10	0,00	865,31
Kec. Lemahwungkuk	718,94	0,00	0,00	718,94
Kec. Pekalipan	159,76	0,00	0,00	159,76
Kota Cirebon	2.560,25	1.053,95	333,10	3.946,60

C. Klimatologi

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fluktuasi curah hujan yang disebabkan fenomena El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fenomena yang berdampak kekeringan pada wilayah di Indonesia. Sedangkan fenomena La Nina akan berdampak pada curah hujan yang lebih banyak dari biasanya. Untuk suhu udara di Kota Cirebon memiliki temperatur udara yang cukup tinggi dikarenakan lokasinya yang berada di pantai utara pulau Jawa yaitu suhu udara rata-rata tahun 2023 antara 26,4°C hingga 30,6°C. Sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan dan maksimum rata-rata 28,3°C. Pada tabel berikut disajikan data fluktuasi suhu udara di Kota Cirebon yang bersumber dari Pos Meteorologi Penggung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.6 mengenai rata rata suhu udara di Kota Cirebon.

Tabel III.6 Rata-rata Suhu Udara per Bulan di Kota Cirebon (°C)

No	Bulan	2020			2021			2022			2023		
		Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks	Min	Rata ²	Maks
1.	Januari	23,6	27,8	35,2	23,2	26,5	33,0	23,0	27,3	34,4	22,8	26,9	35,5
2.	Februari	23,0	27,2	33,8	22,8	26,5	33,8	23,0	26,9	34,6	22,8	26,4	33,6
3.	Maret	21,4	27,7	34,4	22,2	27,3	34,6	22,6	27,4	34,5	22,2	27,3	34,8
4.	April	23,2	28,0	34,8	22,8	28,1	35,0	22,8	27,9	34,8	22,8	27,8	34,6
5.	Mei	23,8	28,3	34,8	22,9	28,4	34,8	22,8	28,1	34,4	22,7	28,6	34,2
6.	Juni	22,8	27,8	34,6	23,0	27,3	34,4	22,4	27,2	33,6	21,9	28,4	35,6
7.	Juli	21,0	28,0	34,0	21,2	27,7	34,6	21,0	27,5	34,0	22,0	28,1	34,4
8.	Agustus	22,4	28,5	35,6	22,8	28,6	36,4	22,8	28,2	35,2	19,0	28,1	36,2
9.	September	23,2	29,7	36,4	22,6	28,9	35,8	22,8	29,0	36,0	20,6	29,3	36,8
10.	Oktober	23,2	29,2	37,0	23,0	29,5	37,0	22,6	28,0	35,4	21,5	30,6	38,4
11.	Nopember	23,6	28,6	35,4	22,2	27,6	35,0	22,0	27,5	35,0	24,2	30,2	37,4
12.	Desember	22,9	26,9	34,0	22,8	27,4	34,4	22,4	27,2	34,0	23,8	29,4	36,4
Rata-rata		22,8	28,1	35,0	22,6	27,8	34,9	22,5	27,7	34,7	34,09	22,19	28,43

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Kota Cirebon termasuk daerah kota yang beriklim tropis yang memiliki dua macam musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan bulan basah umumnya lebih banyak dari pada bulan kering. Suhu rata-rata di Kota Cirebon yaitu 23,59°C hingga 31,56°C.

Tabel III.7 Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Cirebon (mm)

No	Bulan	2020		2021		2022		2023	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
1.	Januari	550	24	437,5	25	490,1	26	409,8	18
2.	Februari	588,3	25	540,5	21	242,9	22	396,1	23
3.	Maret	370,5	25	261,7	19	242,9	22	204,8	10
4.	April	176,5	16	134,6	11	293,5	15	207,3	20
5.	Mei	240,1	17	55	7	168,3	16	86,5	10
6.	Juni	92,6	7	159,4	14	126,6	14	62,3	3
7.	Juli	50,9	5	20,4	5	212,1	10	11	3
8.	Agustus	8,3	6	16,5	4	1,7	2	0	0
9.	September	18,6	4	118,1	7	27,1	7	0	0
10.	Oktober	137,7	9	67,8	5	327,6	16	5	4
11.	Nopember	212,8	14	302,5	23	182,2	20	82,5	11
12.	Desember	212,8	22	418,3	27	409,8	18	114,7	14
Jumlah		2659,1	172	2532,3	168	2725	188	1580	116
Rata-rata		221,59	14,33	211,03	14	227,1	15,67	131,67	9,67

Sumber: Posmet BMKG Penggung Cirebon.

Tabel III.8 Curah Hujan Kota Cirebon Per-Kecamatan

Kecamatan	Klasifikasi Curah Hujan (mm/Tahun)		
	2000 – 2500 mm	2500 – 3000 mm	Total
Kec. Harjamukti	630,84	1.129,52	1.760,2
Kec. Kejaksan	444,1		444,1
Kec. Kesambi	779,08	86,23	865,3
Kec. Lemahwungkuk	718,5		718,5
Kec. Pekalipan	158,5		158,5
Kota Cirebon	2.731,02	1.215,74	3.946,6

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

D. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai. Daerah Aliran Sungai yang masuk di Kota Cirebon terdiri dari 5 DAS yaitu DAS Cipager, DAS Grenjeng, DAS Kalijaga, DAS Kedungpane, dan DAS Kenari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut.

Tabel III.9 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Cirebon

DAS	Luas (HA)
DAS Cipager	0,64
DAS Grenjeng	1.013,55
DAS Kalijaga	1.678,18
DAS Kedungpane	1.254,41
DAS Kenari	1,26
Kota Cirebon	3.946,6

E. Penggunaan Lahan

Lahan merupakan salah satu elemen utama pembentuk ruang perkotaan dimana aktivitas kota berlangsung sehingga lahan menjadi sumber daya yang sangat penting bagi sebuah kota. Sebagai elemen penting dalam kegiatan perkotaan, penggunaan lahan menjadi harus dikelola untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan kota. Dari sudut pandang ekonomi, lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi (Lichrield dan Drabkin, 1980). Penggunaan lahan dapat dipahami sebagai wujud atau bentuk usaha kegiatan, pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu (Jayadinata, 1992).

Penggunaan lahan di Kota Cirebon menggunakan penggunaan lahan Tahun 2021 yang terdiri dari 22 jenis lahan. Penggunaan lahan yang mendominasi di Kota Cirebon yaitu bangunan permukiman/ campuran dengan luas 1.927,98 Ha (48,85%) dari total keseleluruhan, diikuti oleh penggunaan lahan Semak belukar dengan luas 365,13 Ha (9,25%). Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut.

Tabel III.10 Penggunaan Lahan Kota Cirebon Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Kecamatan (HA)					Total	%
		HARJAMUKTI	KEJAKSAN	KESAMBI	LEMAHWUNGKUK	PEKALIPAN		
1	Area parkir dan lapangan	4,29	0,70	1,51	10,53		17,03	0,43%
2	Bangunan Bukan Permukiman	42,54	70,25	93,55	191,50	6,20	404,04	10,24%
3	Bangunan Permukiman/Campuran	708,68	262,64	571,24	252,00	133,42	1.927,98	48,85%
4	Hamparan Pasir	10,49			5,49		15,98	0,40%
5	Hutan				3,66		3,66	0,09%
6	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	15,02	10,00	44,85	9,73	1,56	81,17	2,06%
7	Jaringan Jalan	38,75	16,60	28,15	20,13	7,02	110,65	2,80%
8	Jaringan Rel Kereta	1,49	6,63	1,87	5,75	10,64	26,39	0,67%
9	Kebun Campuran	342,35	8,00	3,59			353,95	8,97%
10	Kolam Air Tawar	10,06		0,48	3,95		14,48	0,37%
11	Lahan terbuka Alami lainnya	152,71	9,20	25,07	67,76		254,74	6,45%
12	Padang rumput	17,99					17,99	0,46%
13	Permukaan diperkeras lain		1,30	0,46	3,00		4,75	0,12%
14	Permukaan/Lapangan Diperkeras	2,46	1,49	2,63	0,98		7,55	0,19%
15	Rawa				5,91		5,91	0,15%
16	Saluran Air		1,29	0,00	0,74	0,52	2,55	0,06%
17	Sawah	97,00		17,89	21,34		136,23	3,45%
18	Semak Belukar	253,29	5,66	50,29	55,89	0,00	365,13	9,25%
19	Sungai	8,59	3,52	1,22	7,72	0,40	21,46	0,54%
20	Tambak		37,35		46,87		84,22	2,13%
21	Tegalan/Ladang	50,08	8,30	22,51	5,98		86,86	2,20%
22	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	4,57					4,57	0,12%
Total		1.760,35	442,93	865,31	718,94	159,76	3.946,6	100%

Sumber : RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045

3.2 KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang merupakan nilai yang dapat menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam mengukur capaian IKLH, dilakukan klasifikasi penilaian menjadi 5 kategori yaitu:

- Sangat baik ($\text{_____} \geq 90$);
- Baik ($70 \leq \text{_____} < 90$);
- Sedang ($50 \leq \text{_____} < 70$);
- Buruk ($25 \leq \text{_____} < 50$); dan
- Sangat buruk ($\text{_____} < 25$).

Indeks ini mencakup sejumlah parameter yang mencerminkan keadaan lingkungan, baik dari segi biologis, fisik, maupun kimia. Indikator kualitas lingkungan mulai tahun 2020 terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Salah satu metode untuk menghitung status mutu air untuk menentukan IKA digunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II

sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tahun 2022 dilakukan pengambilan sampel pada 13 titik pengamatan yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon. Sebanyak 11 titik sampling diantaranya dalam kategori tercemar ringan dan 2 titik sampling dalam kategori tercemar sedang. Sedangkan pada periode 2 tahun 2022 dapat dilihat bahwa 12 titik sampling dalam kategori tercemar ringan dan 1 titik sampling dalam kategori tercemar sedang.

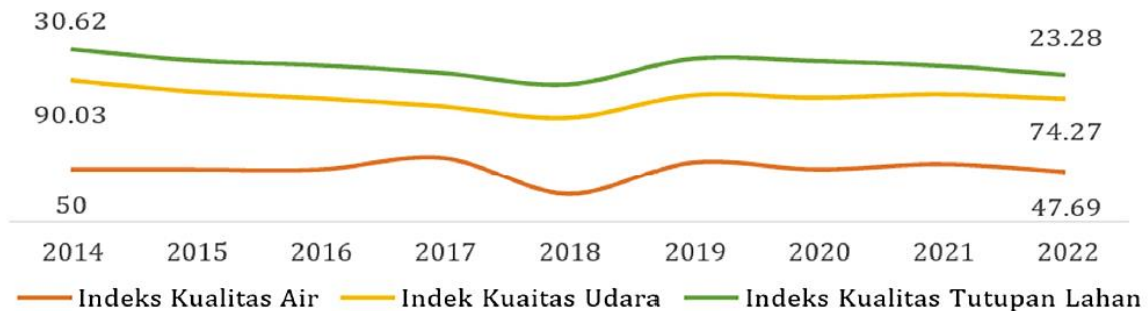
IKU di Kota Cirebon dihitung berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, perkantoran, kawasan industri, dan transportasi. Pada Tahun 2022 dilakukan pengujian kualitas udara hasil pengukuran pada 12 titik pengamatan di Kota Cirebon. Berdasarkan analisis laboratorium hasil pengukuran pada 12 titik pengamatan, kandungan Nitrogen Dioksida (NO_2) pada tahun 2022 yang terkecil terdapat di kawasan pemukiman sedangkan nilai kandungan yang terbesar terdapat berada di wilayah perkantoran dan transportasi. Sedangkan untuk kandungan rata-rata Sulfur dioksida (SO_2) yang terkecil terdapat di wilayah perkantoran, sedangkan nilai kandungan yang terbesar terdapat kawasan industri.

Sedangkan, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan luas tutupan hutan yang ada di Kota Cirebon. Tutupan hutan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, semak/belukar, semak/belukar rawa, dan ruang terbuka hijau.

IKLH di Kota Cirebon yang mengalami fluktuasi pada nilai indeksnya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya beberapa kali perubahan dalam metode yang digunakan terutama yang terlihat sangat signifikan penurunan di tahun 2018. Di tahun 2022 nilai IKA berada pada nilai 47,69 menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu 55,38 dan 50 di tahun 2020. Adapun penyebab penurunan IKA ini bisa termasuk karena adanya peningkatan pencemaran industri, perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang mempengaruhi kualitas air.

IKU selama 9 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Perubahan dalam metode yang digunakan dalam kurun waktu tersebut menjadi salah satu penyebab naik turunnya angka IKU. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan signifikan dalam nilai IKU, mencapai 78,03. Namun, selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2019 dan 2021, meskipun

terjadi sedikit peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 74,27 (Kategori Baik) dengan nilai rerata hasil pengukuran NO₂ sebesar 15,05 µg/m³ dan SO₂ 12,86 µg/m³.

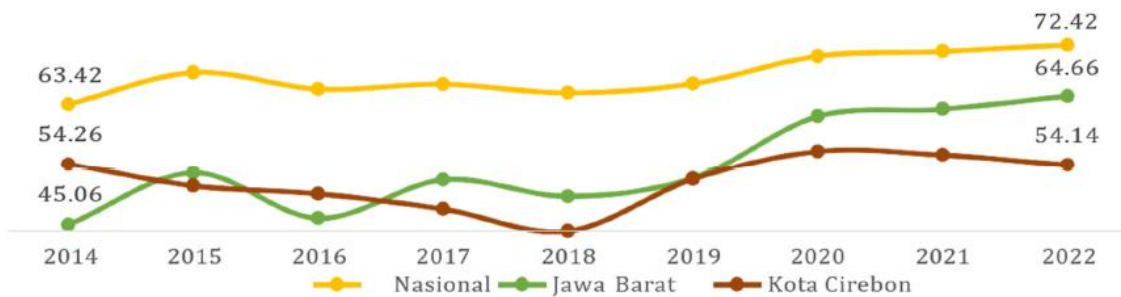


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Gambar III.1 Indikator IKA, IKU dan IKTL Kota Cirebon

Sedangkan, selama periode tahun 2014-2020 nilai indeks kualitas tutupan lahan di Kota Cirebon cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021- 2022 terjadi penurunan cukup signifikan dimana pada tahun 2020 nilai IKTL mencapai 35,78, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 27,96 dan kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2022 menjadi 23,28. Terjadinya alih fungsi lahan di Kota Cirebon menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan nilai IKTL. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar III.1.

IKLH dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Cirebon. Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan sebagai indikator seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar III.2 berikut mengenai nilai IKLH Kota Cirebon.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, 2023

Gambar III.2 IKLH Nasional, Jawa Barat dan Kota Cirebon

Perhitungan IKLH tahun 2018 Kota Cirebon berada pada angka 44,07. Jika dimasukkan pada rentang nilai IKLH maka nilai IKLH Kota Cirebon tergolong dalam kategori “Kurang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2019, dapat diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 51,96 tergolong dalam kategori “Sedang”. Sedangkan dari perhitungan IKLH tahun 2020, dapat diketahui bahwa IKLH Kota Cirebon berada pada angka 56,25 tergolong dalam kategori “Sedang”. Selanjutnya untuk tahun 2021, nilai IKLH Kota Cirebon tergolong dalam kategori “Sedang”, dimana maka nilai IKLH Kota Cirebon berada pada angka 55,70. Secara umum, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nilai IKLH Kota Cirebon pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan walaupun kategorinya masih sama yaitu dalam kategori “Sedang”. Data tersebut juga menunjukkan bahwa nilai IKLH Kota Cirebon masih ada dibawah nilai IKLH Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

3.3 KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL KOTA CIREBON

Aspek kependudukan sangat berperan dan menjadi subjek serta objek daripada pembangunan. Distribusi penduduk Kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan. Penduduk terbanyak berada pada kecamatan Harjamukti sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan Pekalipan. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduknya yang dihitung dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan, nampak terlihat kepadatan penduduk tertinggi berada pada kecamatan Pekalipan dan kepadatan penduduk terendah pada kecamatan Harjamukti.

Tabel III.11 Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Kejaksan	51.268	4.441	11.544
Lemahwungkuk	61.073	7.185	8.500
Harjamukti	128.587	17.602	7.305
Pekalipan	31.423	1.585	19.825
Kesambi	79.996	8.653	9.245
Kota Cirebon	352.347	39.466	8.928

Sumber: Disdukcapil Kota Cirebon 2024

Kota Cirebon termasuk berpenduduk cukup padat dan ramai, karena menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sebagai daerah perbatasan, Cirebon dianggap mempunyai budaya perbatasan, yaitu memiliki budaya campuran, yakni Sunda dan Jawa. Selain itu, sebagai daerah pertemuan budaya antara Suku Jawa, Suku Sunda, Bangsa Arab, Bangsa China dan para pendatang dari Eropa sejak beberapa abad silam, masyarakat Cirebon dalam berbahasa biasa menyerap kosakata bahasa-bahasa tersebut kedalam bahasa Cirebon. Penduduk Kota Cirebon terbanyak bekerja sebagai nelayan, pedagang/pengusaha, dan PNS. Mereka yang bekerja sebagai nelayan diperkirakan sebesar 31,43 persen sementara yang bekerja sebagai pedagang/pengusaha sebesar 30,39 persen. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor pertanian diperkirakan sebesar 17,14 persen.

3.4 ARAH PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON

Visi pembangunan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045 yaitu : MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN. Tahapan pembangunan yang ada di dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045 khususnya periode 1 (2025-2029) yaitu Fondasi berupa Persiapan dasar pembangunan yang berkesinambungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan capaian kinerja pembangunan yang belum optimal. Berikut ini merupakan gambar skenario petahapan pembangunan menurut RPJPD Kota Cirebon Tahun 2025-2045.

Penjabarkan visi tersebut maka disusun misi yang berjumlah 8 (delapan) misi yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Unggul
2. Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Global, Inklusif, dan Berkelanjutan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
4. Menciptakan stabilitas ekonomi, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menuju kondusifitas daerah
5. Mewujudkan masyarakat madani yang berwawasan lingkungan, tangguh dan berbudaya
6. Mewujudkan Kemantapan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berketahanan
7. Mewujudkan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu arahan Pengembangan Kota Cirebon menurut Perda No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 berkaitan dengan Rencana Struktur Ruang Kota Cirebon yaitu sistem jaringan sumber daya air. Sistem jaringan sumber daya air di Kota Cirebon, meliputi

1. Wilayah Sungai (WS);
2. DAS, meliputi : DAS Kaliwedi, DAS Ciwaringin, DAS Kalianyar, DAS Jatiroke, DAS Karanganyar, DAS Cipager, DAS Kedungpane, DAS Grenjeng, DAS Kalijaga, DAS Kenari, dan DAS Cikanci.
3. Embung meliputi : Embung di Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dengan kapasitas kurang lebih 5000 (lima ribu) meter kubik; dan Embung Kalijaga di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti dengan kapasitas kurang lebih 7000 (tujuh ribu) meter kubik.
4. Jaringan dan prasarana air baku untuk air bersih meliputi pemanfaatan sumber air baku yang berasal dari Mata Air Cipaniis Kabupaten Kuningan.
5. Sistem pengendalian daya rusak air terdiri atas
6. Pembangunan DAM/Waduk Benda di Kelurahan Argasunya;
7. Pembuatan sumur resapan di kawasan peruntukan perumahan, industri, serta perdagangan dan jasa;
8. Pengendalian dan penertiban bangunan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada;
9. Pembangunan embung di Kelurahan Larangan dan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti; dan
10. Pembuatan sistem kolam tunggu di sepanjang saluran primer dan sekunder di daerah pesisir pantai Kota Cirebon yang sering terjadi air tertahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 KETERSEDIAAN PANGAN B2SA LOKAL

Berdasarkan hasil analisis tren ketersediaan pangan Kota Cirebon periode 2019–2024, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel IV.1, secara umum ketersediaan energi (AKE) dan protein (AKP) masih berada di atas standar kecukupan, meskipun menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan antar tahun. Pada tahun 2019 dan 2020, ketersediaan energi dan protein berada pada tingkat sangat memadai, masing-masing di atas 130% AKE dan AKP. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas, pasokan pangan relatif mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Tabel IV.1 Indikator ketersediaan pangan Kota Cirebon Tahun 2019 - 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan per kapita (% AKE)	152,87	136,1	N.A	160,0	118,2	105,38
Ketersediaan per kapita (% AKP)	150,6	134,5	N.A	160,8	93,3	133,49
Skor PPH Ketersediaan	99,6	99,8	N.A	85,7	86,4	93
Produksi Pangan Setempat	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

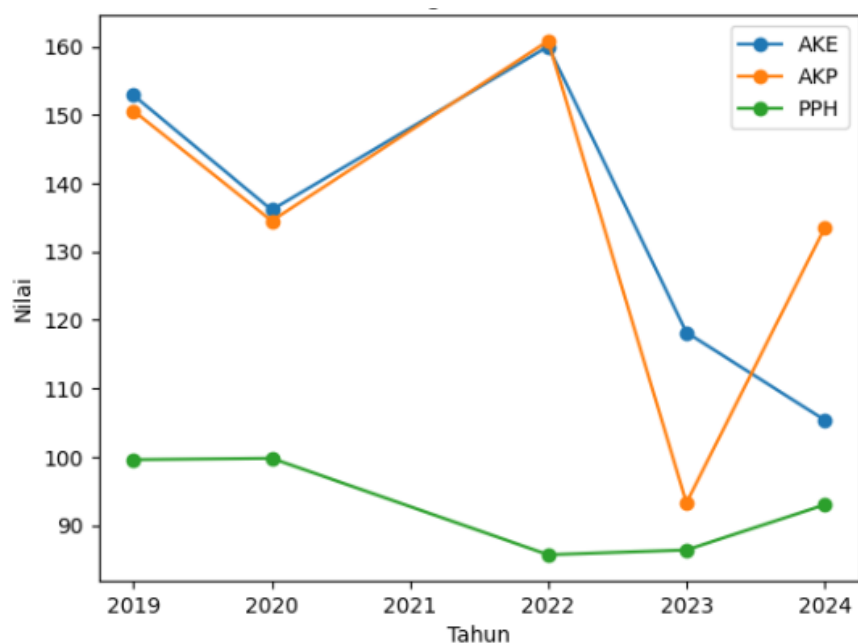
Sumber : Dinas KP3 Kota Cirebon

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan tajam ketersediaan energi dan protein yang mencapai sekitar 160% AKE dan AKP. Namun demikian, peningkatan kuantitas tersebut tidak diikuti oleh kualitas konsumsi pangan, yang tercermin dari penurunan skor PPH menjadi 85,7. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan masih didominasi oleh kelompok pangan tertentu dan belum mencerminkan struktur pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Pada tahun 2023 dan 2024, ketersediaan energi dan protein mengalami penurunan, khususnya AKE yang turun hingga 105,38% pada tahun 2024. Meskipun demikian, skor PPH menunjukkan tren perbaikan, dari 86,4 pada tahun 2023 menjadi 93 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran positif

menuju pola pangan yang lebih beragam, meskipun masih belum sepenuhnya mencapai skor ideal PPH sebesar 100.

Secara keseluruhan yang dapat dilihat pada Gambar , menunjukkan bahwa tantangan utama Kota Cirebon bukan semata pada kecukupan pangan secara kuantitatif, melainkan pada ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal. Dengan karakteristik Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan produksi, penguatan ketersediaan pangan ke depan perlu diarahkan pada optimalisasi sumber daya lokal, sistem distribusi yang efisien, serta integrasi dengan upaya penganekaragaman konsumsi pangan.



Sumber : data diolah

Gambar IV.1 Grafik tren ketersediaan pangan Kota Cirebon Tahun 2019 – 2024

4.2 PEMENUHAN KONSUMSI B2SA LOKAL

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Cirebon, Tabel IV.2, dilakukan analisis per kelompok pangan untuk menilai sejauh mana struktur ketersediaan dan konsumsi pangan di Kota Cirebon telah mendukung penerapan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pendekatan ini menggunakan komposisi kelompok pangan utama yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah.

Tabel IV.2 Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi per kelompok pangan
Tahun 2019 - 2024

No.	Kelompok Pangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,6	0,5	0,8	0,7	0,6	0,57
3.	Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	4,5	5,0	5,0	4,9	5,0	4,73
5.	Buah/ Biji Berminyak	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,09
6.	Kacang- kacang	5,7	6,0	5,7	6,8	7,3	7,42
7.	Gula	1,4	1,1	1,2	1,1	0,8	0,77
8.	Sayur dan Buah	28,9	24,8	26,3	30,0	30,0	30,0
9.	Lain-lain	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	90,2	86,5	88,1	92,6	92,8	92,58

Sumber : data diolah

1. Padi-padian

Kelompok padi-padian menunjukkan proporsi yang relatif stabil dan dominan sepanjang periode analisis. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai pangan pokok utama. Dari perspektif B2SA, dominasi padi-padian berkontribusi terhadap kecukupan energi, namun apabila tidak diimbangi dengan kelompok pangan lain, berpotensi menurunkan aspek keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan. Oleh karena itu, ketergantungan yang tinggi terhadap padi-padian perlu dikurangi secara bertahap melalui diversifikasi pangan lokal.

2. Umbi-umbian

Kontribusi umbi-umbian dalam struktur pangan relatif rendah dan cenderung stagnan. Padahal, umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat alternatif yang berpotensi mendukung keberagaman pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap beras. Rendahnya konsumsi umbi-umbian menunjukkan bahwa potensi

pangan lokal ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pola konsumsi B2SA.

3. Pangan Hewani

Kelompok pangan hewani memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan protein dan zat gizi mikro esensial. Secara umum, ketersediaan pangan hewani di Kota Cirebon relatif memadai. Namun demikian, aspek keterjangkauan dan pemerataan konsumsi antar kelompok masyarakat masih menjadi tantangan. Dalam konteks B2SA, pangan hewani berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi, tetapi perlu diimbangi dengan sumber protein nabati lokal agar pola konsumsi lebih seimbang dan berkelanjutan.

4. Minyak dan Lemak

Kelompok minyak dan lemak menunjukkan proporsi yang relatif stabil dan berada dalam batas yang wajar. Kelompok ini berperan sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Namun demikian, konsumsi minyak dan lemak perlu dikendalikan agar tidak berlebihan, mengingat konsumsi berlebih dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dalam prinsip B2SA, kelompok ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan komponen utama konsumsi.

5. Buah/Biji Berminyak

Kontribusi buah dan biji berminyak tergolong sangat rendah. Padahal kelompok pangan ini merupakan sumber lemak sehat dan zat gizi mikro. Rendahnya peran kelompok ini menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi sumber lemak dalam pola konsumsi masyarakat. Peningkatan pemanfaatan buah dan biji berminyak lokal dapat menjadi salah satu strategi untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan.

6. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan menunjukkan tren kontribusi yang meningkat dan memiliki peran strategis sebagai sumber protein nabati. Kelompok ini sangat relevan dalam mendukung prinsip B2SA karena dapat menjadi alternatif protein yang lebih terjangkau dan berbasis sumber daya lokal. Optimalisasi konsumsi kacang-kacangan juga mendukung diversifikasi pangan dan penguatan ketahanan pangan lokal.

7. Gula

Kontribusi gula dalam struktur pangan relatif kecil dan cenderung menurun. Kondisi ini sejalan dengan upaya pengendalian konsumsi gula untuk mendukung

pola konsumsi yang lebih sehat. Dalam konteks B2SA, pengendalian konsumsi gula merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan dan keamanan pangan.

8. Sayur dan Buah

Kelompok sayur dan buah menunjukkan kontribusi yang cukup besar dan cenderung meningkat. Hal ini merupakan indikasi positif terhadap penerapan prinsip B2SA, mengingat sayur dan buah merupakan sumber utama vitamin, mineral, dan serat pangan. Namun demikian, peningkatan kuantitas konsumsi perlu diiringi dengan peningkatan kualitas dan keberagaman jenis sayur dan buah, khususnya yang berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) periode 2019–2024, konsumsi pangan masyarakat Kota Cirebon menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020, skor PPH berada pada kisaran 99,6–99,8 yang mendekati nilai ideal 100, mengindikasikan bahwa struktur konsumsi pangan masyarakat relatif beragam dan mendekati prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan skor PPH yang cukup signifikan menjadi 85,7 dan relatif stagnan pada tahun 2023 sebesar 86,4. Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan, yang diduga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, tekanan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dan beragam, khususnya pangan berbasis sumber daya lokal.

Pada tahun 2024, skor PPH mengalami peningkatan menjadi 93,0. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian ini masih berada di bawah skor ideal PPH. Hal tersebut menandakan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Cirebon masih didominasi oleh kelompok pangan tertentu, terutama padi-padian dan pangan hewani, sementara konsumsi umbi-umbian, buah, dan pangan lokal alternatif belum optimal.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama konsumsi pangan di Kota Cirebon bukan pada kecukupan kuantitas pangan, melainkan pada kualitas dan keberagaman konsumsi pangan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal sebagai bagian dari pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

4.3 DAYA DUKUNG SUMBER DAYA LOKAL

Pengembangan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap daya dukung wilayah sebagai fondasi utama perumusan kebijakan dan strategi implementasi. Daya dukung wilayah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dan mengelola berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kota Cirebon sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan ruang dan karakteristik sosial-ekonomi yang dinamis, analisis daya dukung wilayah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penganeekaragaman pangan dapat dikembangkan secara realistis dan efektif.

Daya dukung wilayah dalam pengembangan penganeekaragaman pangan lokal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, penguasaan dan pemanfaatan teknologi, serta aspek keberlanjutan lingkungan. Kelima aspek tersebut saling terkait dan membentuk suatu sistem yang menentukan kemampuan daerah dalam memproduksi, mengolah, mendistribusikan, dan mengonsumsi pangan lokal secara berkelanjutan. Keterbatasan atau kelemahan pada salah satu aspek dapat memengaruhi efektivitas pengembangan penganeekaragaman pangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, subbab ini secara khusus disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis daya dukung wilayah Kota Cirebon dalam mendukung pengembangan penganeekaragaman pangan lokal. Identifikasi dilakukan dengan menelaah kondisi aktual masing-masing aspek sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil identifikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi, tantangan, serta peluang pengembangan penganeekaragaman pangan lokal di Kota Cirebon, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan strategi dan rekomendasi kebijakan pada bagian berikutnya.

1. Sumber Daya Alam

Analisis aspek sumber daya alam menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya dukung yang terbatas namun strategis dalam pengembangan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Keterbatasan tersebut

terutama terkait dengan luas lahan pertanian, karakteristik wilayah perkotaan, serta keandalan sistem pengairan. Namun demikian, terdapat peluang optimalisasi pada jenis komoditas tertentu dan pendekatan pengelolaan lahan yang adaptif.

Berdasarkan data lahan potensial milik pemerintah, terdapat beberapa lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pangan lokal dengan peruntukan yang berbeda. Lahan seluas $\pm 51.986 \text{ m}^2$ di Kelurahan Harjamukti lebih sesuai untuk pengembangan tanaman keras non-pangan, sehingga berpotensi mendukung fungsi ekologis, konservasi, serta pengembangan tanaman pendukung sistem pangan (misalnya tanaman peneduh atau penyangga lingkungan). Sementara itu, lahan pemerintah di Kelurahan Argasunya ($\pm 3.140 \text{ m}^2$) dan Kelurahan Kalijaga ($\pm 8.110 \text{ m}^2$) dinilai lebih memungkinkan untuk pengembangan tanaman pangan, meskipun dalam skala terbatas

Selain lahan pemerintah, Kota Cirebon masih memiliki lahan pertanian potensial seluas ± 229 hektar yang tersebar di beberapa wilayah dan didominasi oleh lahan sawah yang dilindungi berdasarkan keputusan menteri. Keberadaan lahan sawah dilindungi dan lahan baku sawah seluas ± 93 hektar menunjukkan bahwa fungsi produksi pangan pokok masih menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan ruang pertanian. Namun demikian, keterbatasan luasan dan status perlindungan lahan tersebut membatasi fleksibilitas pengembangan komoditas pangan alternatif dalam rangka penganeekaragaman pangan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang teridentifikasi di Kelurahan Argasunya seluas $\pm 2,69$ hektar memberikan peluang pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, meskipun dalam skala kecil. Lahan ini berpotensi dimanfaatkan untuk komoditas pangan lokal bernilai gizi tinggi, seperti sayuran, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura lainnya yang relevan dengan prinsip B2SA.

Lahan pekarangan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cirebon belum teridentifikasi secara kuantitatif. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi laten yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penganeekaragaman pangan. Dalam konteks wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian konvensional, pekarangan rumah tangga dan ruang terbuka skala kecil memiliki peran strategis sebagai basis pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), khususnya untuk sayur, buah, dan tanaman pangan lokal skala rumah tangga.

Ketersediaan sistem pengairan pada lahan potensial, khususnya yang bersumber dari Daerah Irigasi Bendung Batu Argasunya, dinilai kurang andal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam pengembangan pangan lokal berbasis lahan, terutama untuk komoditas yang membutuhkan pasokan air secara kontinyu. Keterbatasan keandalan irigasi mengindikasikan perlunya pendekatan teknologi adaptif, seperti pemilihan komoditas hemat air, sistem irigasi sederhana, atau pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan yang lebih efisien dalam penggunaan air.

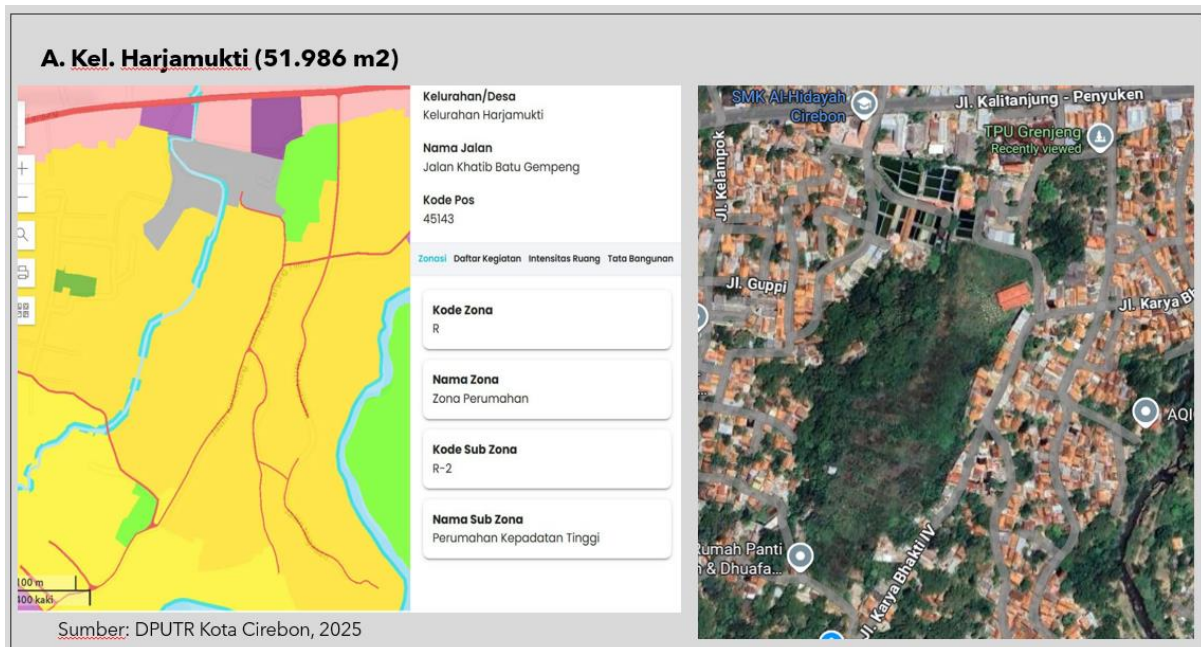
Secara keseluruhan, daya dukung sumber daya alam Kota Cirebon lebih sesuai untuk pengembangan penganekaragaman pangan lokal berbasis skala kecil, intensif, dan adaptif, dibandingkan pengembangan produksi pangan massal. Ketersediaan lahan yang terbatas dan keandalan air yang rendah mengarahkan strategi pengembangan pangan lokal pada komoditas hortikultura, tanaman pekarangan, dan pangan lokal bernilai gizi tinggi yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Tabel IV.3 Kondisi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan

No.	Dimensi dan Indikator	Data dan Informasi	Lokasi	Komoditas Pertanian	Keterangan
	Kemampuan Fisik Lahan dan Ketersediaan Air				
1.	Lahan potensial milik Pemerintah	51986 m2	Kel. Harjamukti	Tanaman keras non pangan	
		3140 m2	Kel. Argasunya	Tanaman pangan	
		8110 m2	Kel. Kalijaga	Tanaman pangan	
2.	Lahan potensial Pertanian	229 ha	Tersebar	Tanaman pangan	Lahan Sawah Dilindungi (SK. Menteri)
		93 ha	Tersebar	Tanaman pangan	Lahan Baku Sawah (SK Menteri)
		2.69 ha	Kel. Argasunya	Tanaman pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3.	Lahan pekarangan	Belum teridentifikasi	Tersebar	Tanaman pangan	
5.	Ketersediaan pengairan untuk lahan potensial	D.I Bendung Batu Argasunya	Kel. Argasunya	-	Keandalannya kurang

Sumber : data diolah

Dengan demikian, pengembangan penganeekaragaman pangan di Kota Cirebon perlu difokuskan pada optimalisasi lahan yang tersedia, pemanfaatan pekarangan, serta penerapan pendekatan pertanian perkotaan dan sistem pangan lokal yang efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan daya dukung sumber daya alam yang ada.



Gambar IV.2 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel Harjamukti, Luas 51.986m²



Gambar IV.3 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel. Argasunya, Luas 3.140m²



Gambar IV.4 Lahan potensial milik pemerintah lokasi Kel. Kalijaga, Luas 8.110 m²

2. Sumber Daya Ekonomi

Analisis aspek sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya dukung ekonomi yang relatif memadai dari sisi infrastruktur dan akses layanan, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek pembiayaan spesifik dan optimalisasi pelaku ekonomi pangan lokal. Kondisi ini memengaruhi kecepatan dan skala pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

Dari sisi pendanaan, sumber modal untuk mendukung kegiatan ekonomi pangan lokal telah tersedia melalui lembaga perbankan, pegadaian, dan BUMN. Terdapat tiga institusi yang secara potensial dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha pangan lokal. Namun demikian, belum terdapat alokasi anggaran khusus dari pemerintah daerah yang secara langsung ditujukan untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. Ketiadaan dukungan fiskal daerah ini menjadi salah satu faktor pembatas dalam mendorong inovasi, ekspansi usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan lokal, khususnya pada tahap awal pengembangan.

Daya dukung infrastruktur di Kota Cirebon secara umum berada pada kondisi baik, meliputi kualitas dan panjang jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, ketersediaan air bersih, akses listrik, serta sanitasi dan layanan kesehatan. Kondisi infrastruktur yang memadai ini merupakan modal penting dalam pengembangan

penganekaragaman pangan lokal, karena mendukung kelancaran distribusi bahan pangan, aktivitas produksi dan pengolahan, serta pemasaran produk pangan lokal. Infrastruktur yang baik juga membuka peluang pengembangan rantai nilai pangan lokal yang lebih efisien dan terintegrasi.

Dari sisi harga pangan, terdapat tantangan berupa volatilitas harga yang cukup signifikan pada beberapa kelompok pangan, khususnya bumbu dasar seperti cabai dan sebagian komoditas protein lokal seperti ikan. Fluktuasi harga ini berpotensi memengaruhi stabilitas usaha pelaku pangan lokal serta daya beli masyarakat. Meskipun demikian, untuk beberapa komoditas kunci, kondisi harga relatif cukup stabil. Hingga saat ini, belum tersedia kajian mengenai proporsi pengeluaran pangan terhadap pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan beragam dan bergizi belum dapat diukur secara komprehensif.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal tercermin dari keberadaan pelaku usaha dan kelompok tani. Terdapat 12 unit UKM pengolahan pangan lokal yang berpotensi menjadi penggerak utama dalam pengembangan produk pangan berbasis sumber daya lokal. Selain itu, terdapat 89 kelompok tani dengan status aktif dan tidak aktif. Kondisi ini menunjukkan adanya basis kelembagaan ekonomi pangan yang cukup luas, meskipun diperlukan penguatan kapasitas, aktivasi kelompok yang tidak aktif, serta peningkatan kemitraan usaha agar peran kelompok tani dan UKM dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, daya dukung sumber daya ekonomi Kota Cirebon cukup kuat pada aspek infrastruktur dan potensi pelaku usaha, namun masih lemah pada aspek kebijakan pembiayaan khusus dan stabilisasi harga pangan lokal. Oleh karena itu, pengembangan penganekaragaman pangan lokal memerlukan intervensi kebijakan yang terarah, terutama dalam bentuk dukungan pendanaan, penguatan kapasitas UKM dan kelompok tani, serta pengendalian fluktuasi harga komoditas strategis.

Daya dukung sumber daya ekonomi di Kota Cirebon memberikan peluang yang signifikan untuk pengembangan penganekaragaman pangan lokal, khususnya melalui pemanfaatan infrastruktur yang memadai dan keberadaan pelaku ekonomi pangan. Namun, untuk mendorong percepatan dan keberlanjutan, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dukungan pembiayaan,

stabilisasi harga, dan fasilitasi pelaku usaha pangan lokal agar potensi ekonomi tersebut dapat berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan konsumsi pangan B2SA.

Tabel IV.4 Kondisi daya dukung sumber daya ekonomi

No.	Dimensi dan Indikator	Data dan Informasi
A.	Ketersediaan modal (Pendanaan diversifikasi pangan)	
1.	Sumber modal	Perbankan, pegadaian, BUMN
2.	Jumlah institusi yang menyediakan permodalan	3
3.	Anggaran yang bersumber dari pemerintah	Belum ada
B.	Infrastruktur	
1.	Panjang dan kualitas jalan	Baik
2.	Jaringan telekomunikasi	Baik
3.	Ketersediaan air bersih	Baik
4.	Ketersediaan akses listrik	Baik
5.	Sanitasi dan kesehatan	Baik
D.	Harga pangan terjangkau	
1.	Fluktuasi harga kelompok pangan	volatilitas signifikan, terutama bumbu dasar (cabai) dan beberapa protein lokal (ikan)
2.	Stabilitas harga pangan	cukup stabil untuk beberapa komoditas kunci
3.	Proporsi harga pangan terhadap pendapatan minimal	Belum ada kajian
E.	Kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal	
1.	Jumlah UKM pengolahan pangan lokal	12
2.	Jumlah kelompok tani yang aktif dan yang tidak aktif	89

Sumber : data diolah

3. Sumber Daya Manusia

Analisis aspek sumber daya manusia menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki daya dukung SDM yang sudah tersedia namun masih perlu diperkuat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun motivasi masyarakat dalam

mendukung pengembangan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. SDM menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan program diversifikasi pangan, terutama di wilayah perkotaan dengan keterbatasan sumber daya alam.

Dari sisi pengetahuan, jumlah penyuluh pertanian yang tersedia di Kota Cirebon tercatat sebanyak 7 orang. Keberadaan penyuluh ini menjadi modal awal yang penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan terkait budidaya pangan lokal, pemanfaatan lahan pekarangan, serta penerapan prinsip B2SA. Namun demikian, jumlah penyuluh tersebut relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah kelompok masyarakat yang perlu didampingi. Selain itu, belum tersedianya pendamping atau kader kelompok tani (poktan) menjadi kendala dalam memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan di tingkat komunitas.

Dari aspek keterampilan, tercatat terdapat dua kegiatan pelatihan yang secara langsung mendukung diversifikasi pangan lokal. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas teknis masyarakat, khususnya dalam budidaya dan pengolahan pangan lokal. Namun, frekuensi pelatihan yang masih terbatas mengindikasikan bahwa peningkatan keterampilan masyarakat belum merata dan belum berkesinambungan. Untuk mendorong percepatan penganeekaragaman pangan, diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, baik pada aspek produksi, pengolahan, maupun pemasaran pangan lokal.

Dari sisi motivasi dan kesadaran, terdapat 454 orang masyarakat yang tergabung sebagai anggota kelompok tani. Jumlah ini mencerminkan adanya basis sosial yang cukup kuat untuk mendukung pengembangan pangan lokal. Selain itu, telah dilaksanakan satu kegiatan pelatihan kader kelompok tani, serta lima kegiatan pelatihan, sosialisasi, atau kampanye diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang melibatkan perangkat daerah dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya diversifikasi pangan dan konsumsi B2SA.

Namun demikian, keterbatasan jumlah kader terlatih dan belum terstrukturanya sistem kaderisasi menyebabkan upaya peningkatan motivasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kesadaran yang tumbuh melalui sosialisasi masih perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan intensif agar

dapat mendorong perubahan praktik konsumsi dan produksi pangan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, daya dukung sumber daya manusia di Kota Cirebon cukup tersedia sebagai modal awal, terutama dari sisi keberadaan penyuluh dan partisipasi masyarakat dalam kelompok tani. Namun, masih terdapat kesenjangan pada aspek jumlah tenaga pendamping, intensitas pelatihan, dan penguatan kader di tingkat komunitas. Oleh karena itu, pengembangan penganeekaragaman pangan lokal memerlukan strategi penguatan SDM melalui peningkatan kapasitas penyuluhan, pembentukan dan pelatihan kader poktan, serta penguatan edukasi dan kampanye B2SA yang berkelanjutan.

Daya dukung sumber daya manusia di Kota Cirebon menunjukkan potensi yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan secara sistematis agar dapat berperan optimal dalam pengembangan penganeekaragaman pangan lokal. Investasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi SDM menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Tabel IV.5 Kondisi daya dukung sumber daya manusia

No.	Dimensi dan Indikator	Data dan Informasi
A.	Pengetahuan	
1.	Jumlah SDM penyuluh pertanian	7 orang
2.	Jumlah pendamping/kader poktan	Belum ada
B.	Keterampilan	
1.	Jumlah kegiatan pelatihan yang mendukung diversifikasi pangan lokal	2 keg
C.	Motivasi dan Kesadaran pentingnya diversifikasi pangan sumber daya lokal	
1.	Jumlah masyarakat sebagai anggota poktan	454 orang
2.	Jumlah kegiatan pelatihan kader poktan	1 keg
3.	Jumlah kegiatan pelatihan/sosialisasi/kampanye diversifikasi pangan sumber daya lokal (perangkat daerah dan atau masyarakat)	5 keg

Sumber : data diolah

4. Teknologi

Analisis aspek teknologi menunjukkan bahwa daya dukung teknologi dalam pengembangan penganeekaragaman pangan lokal di Kota Cirebon masih sangat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Kondisi ini tercermin dari belum tersedianya inovasi teknologi tepat guna yang secara spesifik diarahkan untuk mendukung produksi, pengolahan, dan distribusi pangan lokal berbasis prinsip B2SA.

Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat teknologi pangan lokal yang telah diterapkan secara nyata di tingkat masyarakat maupun pelaku usaha. Ketiadaan teknologi terapan ini menunjukkan bahwa proses produksi dan pengolahan pangan lokal masih dilakukan secara konvensional, dengan efisiensi dan nilai tambah yang relatif rendah. Akibatnya, potensi pangan lokal belum mampu bersaing secara optimal dengan produk pangan non-lokal atau pangan olahan skala industri.

Dari sisi penelitian dan pengembangan, belum terdapat kegiatan penelitian dan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal yang terdokumentasi. Kondisi ini mengindikasikan belum terbangunnya keterkaitan yang kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dalam mendorong inovasi pangan lokal. Padahal, riset dan inovasi berperan penting dalam menciptakan produk pangan lokal yang lebih tahan simpan, bergizi, aman, dan sesuai dengan preferensi konsumen perkotaan.

Selain itu, belum tersedia kajian rantai pasok pangan lokal berbasis prototipe B2SA. Ketiadaan kajian ini menyebabkan perencanaan pengembangan pangan lokal belum berbasis analisis menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Tanpa dukungan kajian rantai pasok, intervensi kebijakan dan program pengembangan pangan lokal cenderung bersifat parsial dan kurang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kondisi daya dukung teknologi yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam percepatan penganeekaragaman pangan lokal di Kota Cirebon. Ketiadaan teknologi tepat guna, riset pengolahan pangan, dan kajian rantai pasok menyebabkan pangan lokal sulit

berkembang menjadi produk yang bernilai tambah, kompetitif, dan mampu mendukung peningkatan konsumsi pangan B2SA secara berkelanjutan.

Daya dukung teknologi dalam pengembangan penganekaragaman pangan lokal di Kota Cirebon belum memadai dan memerlukan perhatian serius. Penguatan aspek teknologi perlu diarahkan pada pengembangan inovasi teknologi tepat guna, peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan lokal, serta penyusunan kajian rantai pasok pangan berbasis B2SA. Dengan penguatan teknologi yang terintegrasi, pangan lokal diharapkan dapat berkembang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Tabel IV.6 Kondisi daya dukung teknologi

No.	Dimensi dan Indikator	Data dan Informasi
A.	Inovasi teknologi tepat guna	
1	Jumlah teknologi pangan lokal yang sudah diterapkan	Belum ada
2	Jumlah penelitian pengembangan dan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal	Belum ada
3	Jumlah kajian rantai pasok pangan berbasis pangan lokal prototipe B2SA	Belum ada

Sumber : data diolah

4.4 UPAYA DAN TANTANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan,
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, Pemerintah Kota Cirebon secara umum mendukung kegiatan penganekaragaman pangan tersebut. Kebijakan ini didukung dengan disusunnya Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 441.1/97/DKPPP terkait dengan kebijakan teknis atau operasional di bidang ketahanan pangan, pertanian, atau perikanan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh perangkat daerah pengampu kegiatan pertanian, pangan, dan peternakan yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan. Program dan Kegiatan seperti Festival makanan etnik berupa lomba olahan pangan berbahan baku lokal, Kegiatan Lomba Cipta Menu berbasis potensi Sumber Daya Lokal yang diikuti oleh ibu-ibu kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar mampu menciptakan inovasi olahan pangan lokal yang mempunyai nilai jual dan diminati banyak orang. Selain itu juga melakukan rencana aksi berupa sosialisasi konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis Pangan Lokal, Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber ketersediaan pangan lokal di tingkat keluarga, melakukan pelatihan atau bimtek tentang diversifikasi olahan pangan lokal kepada ibu-ibu kader PKK, melakukan sosialisasi dan edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi pangan lokal di sekolah. Melakukan gerakan pemanfaatan olahan pangan lokal (Makan dan snack) pada setiap acara rapat kedinasan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui perangkat daerah pengampu yaitu Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi B2SA di

5 (lima) kali di tingkat kelurahan, 1 (satu) kali di tingkat Kota Cirebon dan 1 (satu) kali di tingkat sekolah.

Stakeholder yang turut terlibat dalam penganeekaragaman pangan di Kota Cirebon seperti Kader PKK Tingkat Kelurahan dan Kota Cirebon, dengan peran sebagai peserta lomba. Pemerintah Kota Cirebon memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu kader PKK mulai di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota mensosialisasikan pola konsumsi B2SA berbasis potensi pangan lokal kepada warga masyarakat sekitar. Selain itu stakeholder pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pangan lokal yang mengembangkan produk olahan pangan lokal

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penganeekaragaman pangan, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan stakeholder. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan pembinaan atau monitoring dan evaluasi ke kelompok wanita tani, kelompok PKK dan pelaku usaha. Namun demikian kegiatan koordinasi lintas sektor ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal ini. Sebelum tahun 2019 di Kota Cirebon terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai Lembaga Non Struktural yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumus kebijakan operasional bidang ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Namun sejak tahun 2019, DKP tersebut sudah tidak ada lagi. Namun demikian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penganeekaragaman pangan tetap berjalan dan dilakukan oleh DKP3 yang dilakukan minimal 1 bulan sekali.

Sumber daya (*resources*) yang diperlukan dalam mengelola penganeekaragaman pangan di Kota Cirebon antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana dan Prasarana (alat-alat pengolahan), bahan baku serta lahan. Namun demikian infrastruktur dan sumber daya yang masih terbatas seperti bahan baku terbatas serta keterbatasan lahan sebagai sumber ketersediaan penganeekaragaman pangan lokal di tingkat keluarga

Program dan kegiatan terkait penganeekaragaman pangan di Kota Cirebon sangat diperlukan untuk dalam rencana pembangunan daerah. Hal ini telah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berkaitan dengan ketahanan pangan maupun dalam pengalokasian lahan pertanian dalam rencana tata ruang di Kota Cirebon.

Hingga tahun 2025, dukungan anggaran dan sumber daya guna upaya penganekaragaman pangan di Kota Cirebon telah tersedia anggaran sesuai kewenangan dalam rencana pembangunan daerah. Meskipun demikian, dukungan anggaran masih minim, terlebih 2026 terdampak efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berkaitan dengan Ketersediaan Pangan antara lain:

1. Pemberian stimulan bantuan sarana pertanaman, bantuan kolam, ternak kepada kelompok masyarakat
2. Program mengembangkan pangan lokal sebagai upaya ketersediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan tingkat keluarga
3. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan berbasis RW yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani (Poktan)/ Kelompok Wanita Tani (KWT)/ PKK/Karang Taruna dan lain sebagainya.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah produsen dan kerjasama Business to Business
5. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Perangkat Daerah lainnya terkait urusan pangan, Poktan, Corporate Social Responsibility CSR, Bank Indonesia, Bank Jawa Barat (BJB).

Selanjutnya, upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berkaitan dengan Konsumsi Pangan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan Lomba Keanekaragaman Olahan Pangan/ Diversifikasi olahan pangan.
2. Melaksanakan rencana aksi program dan kegiatan meliputi, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis pengolahan pangan lokal
3. Sosialisasi pola konsumsi BS2A ke masyarakat dan anak sekolah, pemberdayaan masyarakat (KWT/ PKK) dengan memanfaatkan pekarangan untuk dijadikan sumber gizi keluarga berbasis pangan lokal

4. Berkoordinasi dengan stakeholder seperti DKP3 dan Tim Penggerak (TP) PKK, Masyarakat, Sekolah, PKK, Poktan, KWT, Pelaku usaha lokal dan stakeholder yg tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

5. Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat

Selanjutnya, upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berkaitan dengan BS2A antara lain:

1. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selalu mengkampanyekan pola konsumsi pangan B2SA secara kontinyu
2. Sosialisasi program/kegiatan dan Edukasi Pola Konsumsi B2SA berbasis pangan lokal
3. Mengadakan pelatihan olahan pangan lokal
4. Memberikan bantuan sarana pemanfaatan pekarangan berupa benih tanaman/ ikan beserta sarana pendukungnya
5. Berkoordinasi dengan stakeholder : Kader PKK, masyarakat, Poktan, KWT, sekolah

Penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Cirebon juga mengalami hambatan dan tantangan sebagai berikut:

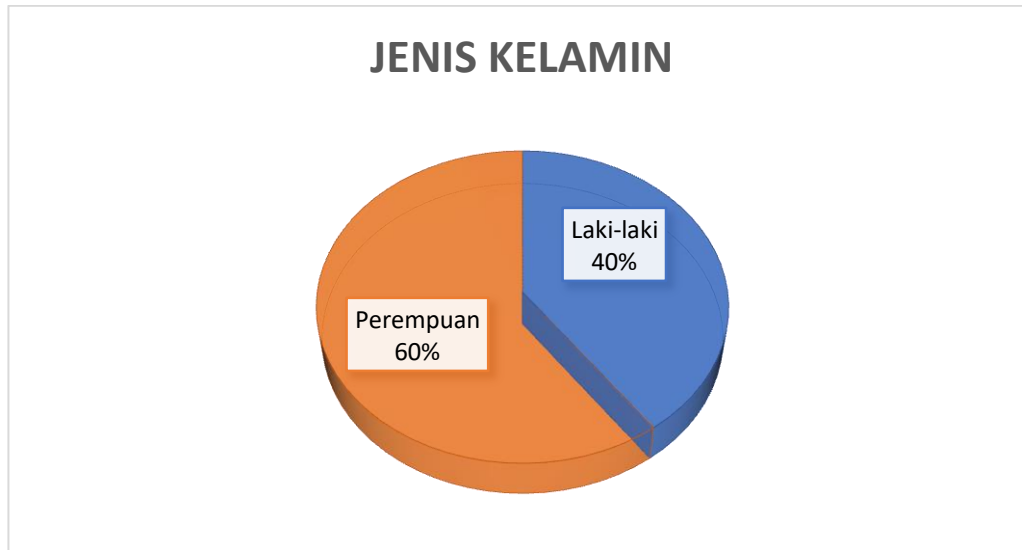
1. Alih fungsi lahan pertanian yang drastis menjadi permukiman dan Kawasan industry.
2. Keterbatasan Lahan Pertanian menyebabkan sumber Ketersediaan pangan juga terbatas
3. Preferensi masyarakat yang masih dominan konsumsi beras
4. Beras sebagai kebutuhan pokok namun mindset masyarakat sudah terbiasa dengan makan nasi, belum dianggap makan kalau belum makan nasi
5. Rendahnya kesadaran konsumsi pangan beragam di masyarakat
6. Masyarakat secara umum terbiasa dengan konsumsi nasi, bahkan daerah perkotaan cenderung memilih makanan praktis cepat saji tanpa mempertimbangkan komposisi nutrisi yang beragam dan berimbang
7. Kurang optimalnya regenerasi petani
8. Saat ini mayoritas petani usia tua. Hal ini dikarenakan profesi petani di mata kaum gen Z kurang menjanjikan masa depan. Minimnya lahan juga menjadi faktor profesi petani tidak diminati sehingga kekurangan generasi penerus

9. Keterbatasan lahan produksi pangan local serta ketersediaan dan akses terhadap lahan produksi pangan
10. Lahan produktif Kota Cirebon sangat terbatas. Selain itu juga Sangat diperlukan akses yang baik akan lahan termasuk dalam pemanfaatannya dan keberlanjutan produksi
11. Perubahan iklim
Iklim turut mempengaruhi penganekaragaman pangan, karena berkaitan dengan musim tanam dan budidaya ikan
12. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat
13. Masyarakat sudah terbiasa dengan mengkonsumsi Nasi menyebabkan sulitnya merubah perilaku masyarakat dalam meningkatkan kualitas konsumsi makan B2SA
14. Sinkronisasi dalam rencana pembangunan dan tata ruang
15. Perlu pemetaan guna melihat lebih mendalam lahan di Kota Cirebon yang berpotensi untuk dijadikan produksi pangan
16. Dinamika sosial ekonomi masyarakat
17. Kualitas ekonomi masyarakat seharusnya linier dengan kualitas konsumsi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang B2SA
18. Fluktuasi harga pangan yang harus dihadapi oleh pelaku kebijakan dan masyarakat
19. Untuk menghindari fluktuasi harga pemerintah hadir dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Salah satunya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah dengan memberdayakan gapoktan/ pelaku usaha pangan lokal
20. Fluktuasi distribusi pangan yang harus dihadapi oleh pelaku kebijakan dan masyarakat
21. Ketersediaan dan akses pangan yang belum merata
22. SDM dan Anggaran
23. Masih terbatasnya jumlah personil penyuluh. Anggaran juga perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan kebermanfaatan program dan kegiatan

4.5 PERAN STAKEHOLDER DIVERSIFIKASI PANGAN

A. Profil Responden

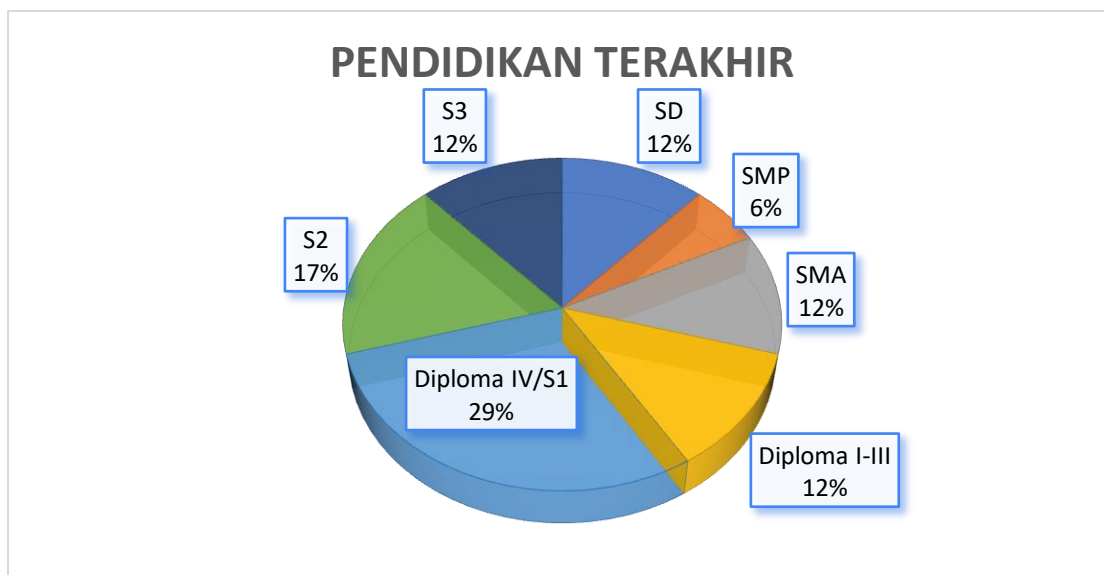
Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang (hasil transkrip kualitatif yang dianalisis) dan berasal dari berbagai kalangan stakeholder terkait diversifikasi pangan di Kota Cirebon. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (60%) dibanding laki-laki (40%), seperti yang ditunjukkan oleh Gambar IV.5.



Sumber: Data diolah

Gambar IV.5 Jenis Kelamin Responden.

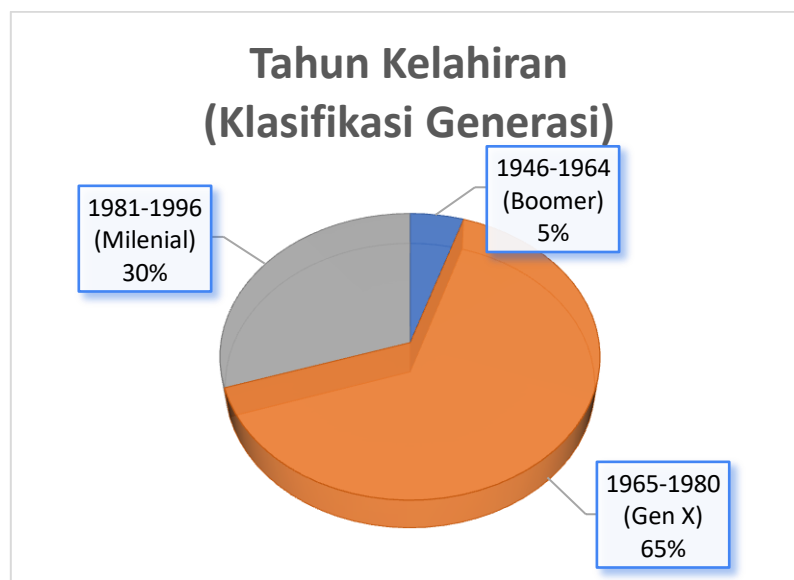
Dari segi pendidikan terakhir, sebagian besar berpendidikan Diploma IV/Sarjana S1 dan Sekolah Menengah Atas (SMA), kedua kelompok ini masing-masing mencakup sekitar 29% dan 12% dari total responden, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar IV.6.



Sumber: Data diolah

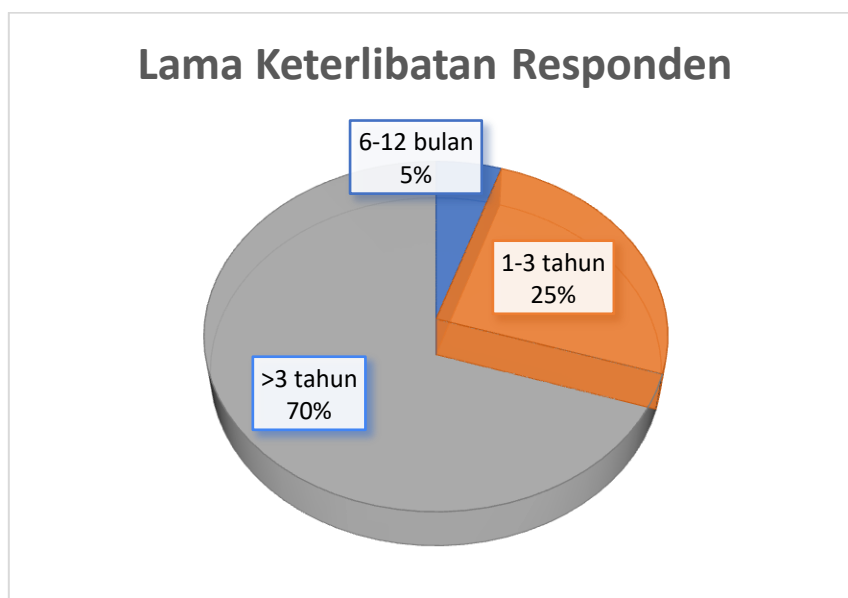
Gambar IV.6 Pendidikan Terakhir Responden

Dilihat berdasarkan kategori umur (klasifikasi generasi) (Badan Pusat Statistik, 2025) yang disajikan pada Gambar IV.7, mayoritas responden tergolong Generasi X (kelahiran tahun 1965-1980) yakni mencapai 65%. Selain itu, sebagian besar responden (70%) telah terlibat dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis lokal selama lebih dari 3 tahun, seperti yang ditampilkan oleh Gambar IV.8. Gambaran ini menunjukkan bahwa responden umumnya merupakan individu yang cukup berpengalaman dan matang dalam program diversifikasi pangan di daerahnya.



Sumber: data diolah

Gambar IV.7 Tahun Kelahiran Responden berdasarkan Klasifikasi Generasi.



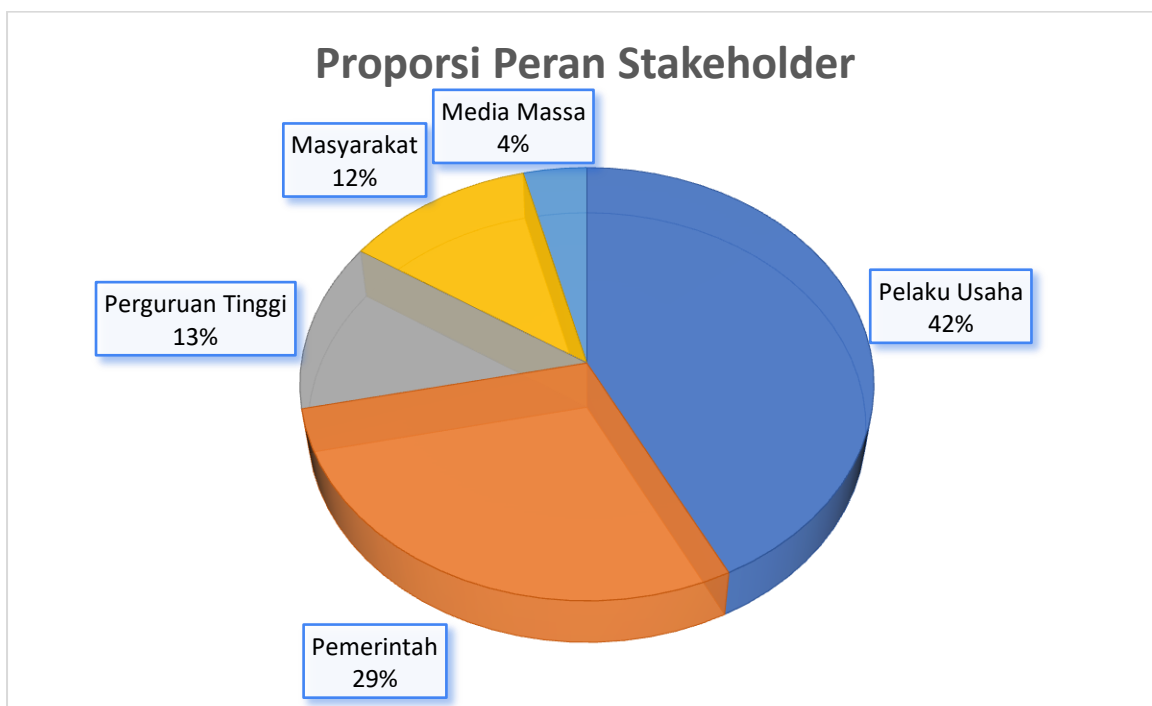
Sumber: data diolah

Gambar IV.8 Lama Keterlibatan Responden dengan Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

B. Analisis Peran Stakeholder

Melalui analisis tematik melalui perangkat lunak NVivo, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah indikator peran *stakeholder* dalam upaya diversifikasi pangan lokal beserta temuan utamanya. NVivo membantu menghitung kepadatan kode (*code density*) atau frekuensi kemunculan kode tertentu.

Secara keseluruhan, masing-masing *stakeholder* memiliki peran dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon dalam hal ketersediaan, konsumsi, pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Rekapitulasi dari *code density* dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pemerintah memiliki proporsi peran yang paling dominan dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon, dengan masing-masing proporsi sebesar 42% oleh pelaku usaha dan 29% oleh pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh Diagram 5.



Sumber: Data Diolah

Gambar IV.9 Proporsi Peran Stakeholder dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Cirebon.

Secara terperinci, proporsi peran *stakeholder* pada aspek ketersediaan, konsumsi, dan B2SA disajikan pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Proporsi Peran Stakeholder Per Aspek Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Kelompok Stakeholder	Ketersediaan	Konsumsi	B2SA	Total
Pelaku Usaha	54	40	10	104
Pemerintah	37	7	4	48
Perguruan Tinggi	16	14	11	41
Masyarakat	15	9	14	38
Media Massa	5	4	0	9

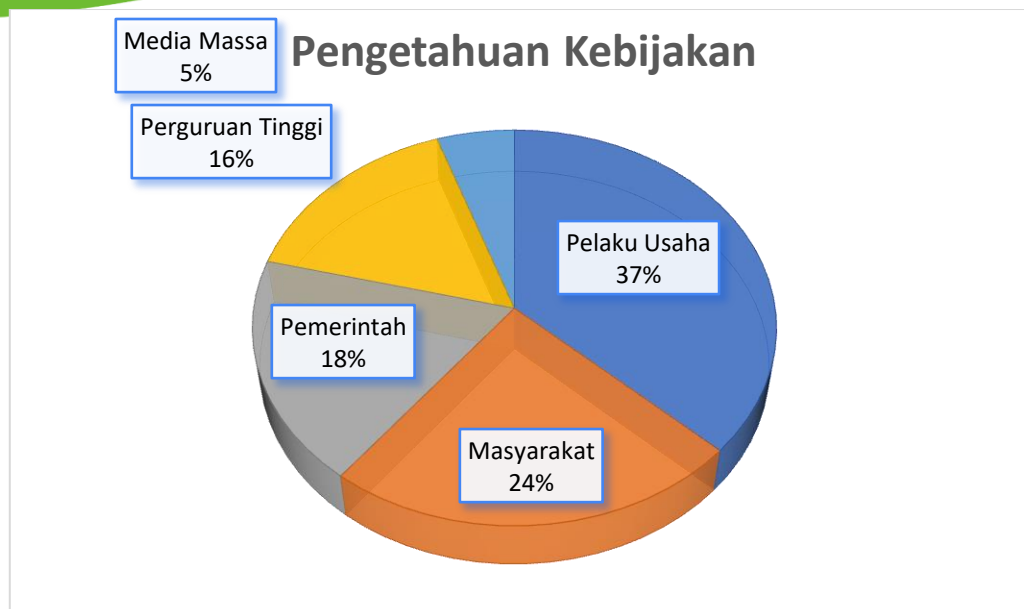
Sumber: data diolah

Hasil analisis peran *stakeholder* dalam masing-masing indikator peran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Terhadap Kebijakan

Secara umum, seluruh *stakeholder* telah mengetahui adanya kebijakan pemerintah yang mendukung upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Di antara seluruh *stakeholder*, pelaku usaha (37%) dan masyarakat (24%) tercatat sebagai *stakeholder* yang paling memahami atau memiliki pengetahuan tentang kebijakan tersebut, seperti yang disajikan pada Gambar IV.10.

Hal ini dapat diindikasikan bahwa kalangan pelaku usaha di sektor swasta (misalnya produsen atau pengolah pangan lokal) dan masyarakat (termasuk petani dan kelompok tani) relatif mengikuti perkembangan regulasi dan program pemerintah terkait penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon. Selain itu, mereka juga menjadi mitra dan penerima manfaat utama dalam kebijakan ini.



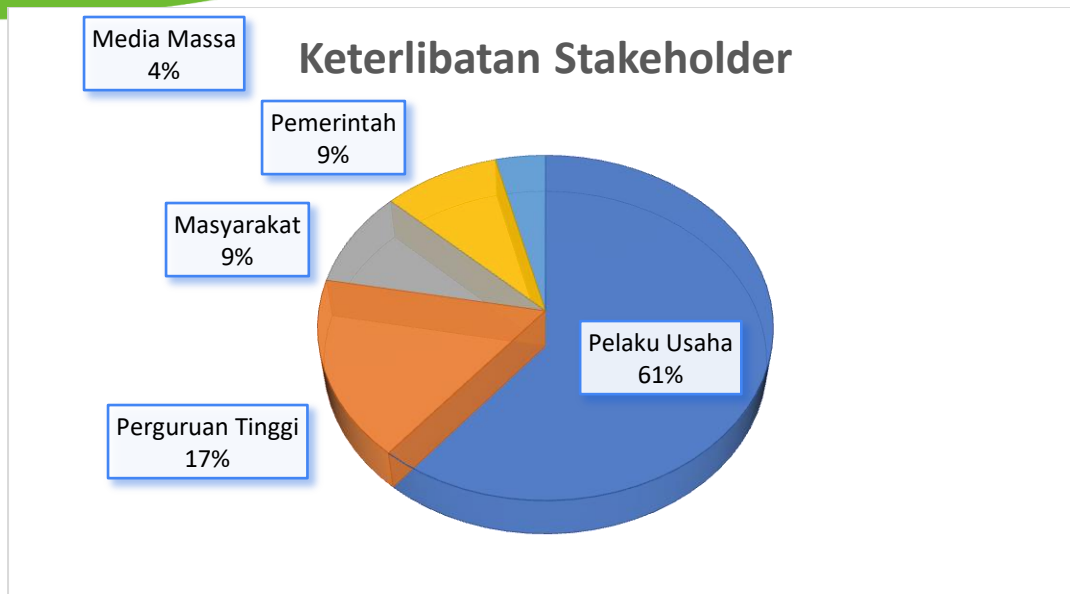
Sumber: data diolah

Gambar IV.10 Pengetahuan Stakeholder terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Kota Cirebon

2. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Pelaku usaha juga merupakan *stakeholder* yang paling aktif terlibat langsung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon, seperti yang disajikan pada Gambar IV.11.

Di samping peran dominan dari sektor usaha (61%), muncul pula inisiatif-inisiatif penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal yang digagas oleh perguruan tinggi (17%), masyarakat setempat (9%), maupun dari pemerintah (9%). Temuan ini mengisyaratkan bahwa sektor non-pemerintah mulai mengambil peran dalam inovasi diversifikasi pangan, namun keterlibatannya perlu terus ditingkatkan.



Sumber: data diolah

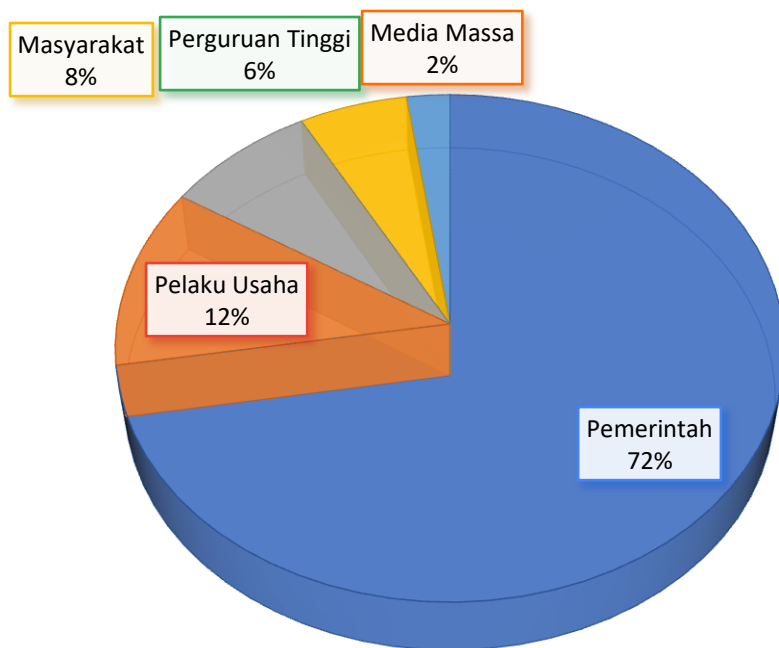
Gambar IV.11 Keterlibatan Stakeholder dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

3. Pelibatan Stakeholder Oleh Pemerintah

Dari sisi internal pemerintah, ditemukan bahwa pemerintah daerah paling banyak melibatkan sesama perangkat daerah lainnya (72%) dalam upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti yang disajikan pada Gambar IV.12.

Sinergi internal antar instansi pemerintah di Kota Cirebon dapat dikatakan sudah terjalin cukup baik. Namun demikian, pelibatan *stakeholder* di luar unsur pemerintah (seperti komunitas, akademisi, sektor swasta, maupun media massa) dalam koordinasi formal masih terbatas dan ke depan perlu diperluas.

Pelibatan Stakeholder Oleh Pemerintah



Sumber: data diolah

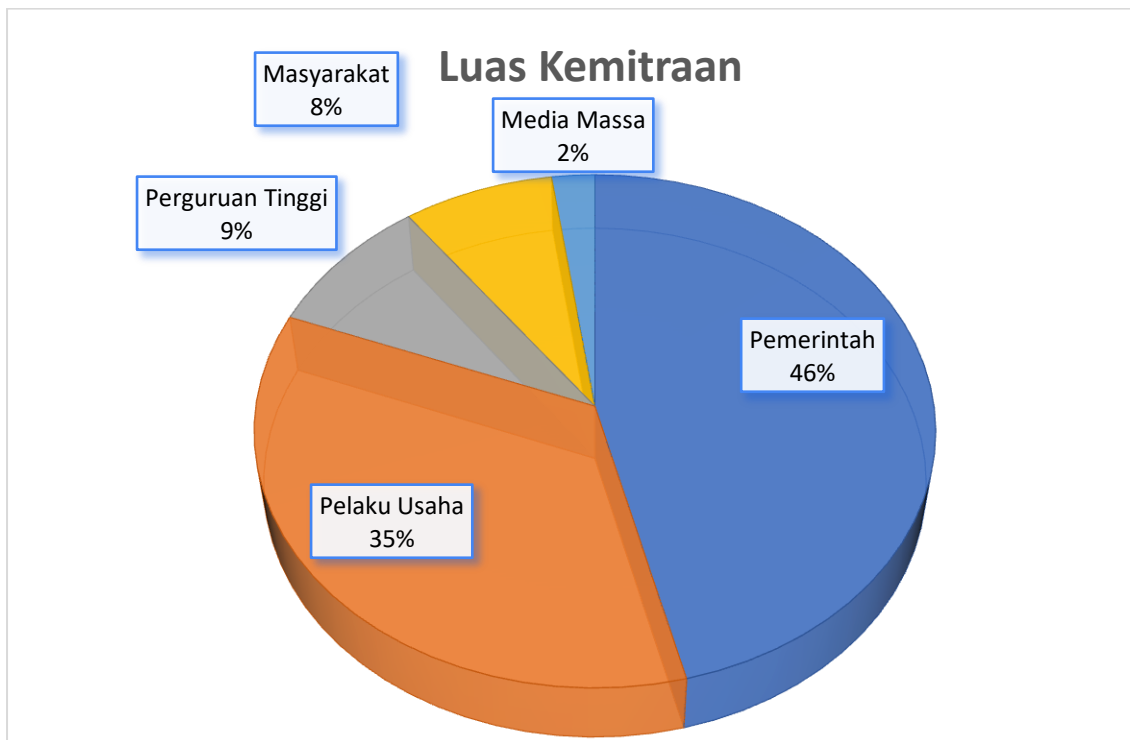
Gambar IV.12 Pelibatan Stakeholder oleh Pemerintah Daerah dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

4. Kemitraan Lintas Sektor

Gambar IV.13 menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor dengan jejaring kemitraan paling luas dalam mendukung upaya penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, dengan proporsi sebesar 46%. Hal ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam menjalin kerja sama lintas sektor, baik secara internal antar-perangkat daerah maupun dengan pihak eksternal seperti pelaku usaha dan masyarakat.

Pelaku usaha menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 35%, mencerminkan peran signifikan sektor swasta dalam membangun jaringan mitra, terutama dalam konteks pengembangan produk dan distribusi pangan lokal. Sementara itu, perguruan tinggi dan masyarakat masing-masing berkontribusi sebesar 9% dan 8%, menunjukkan partisipasi yang cukup namun masih dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek penelitian dan pemberdayaan komunitas. Media massa, dengan proporsi hanya 2%, menunjukkan keterlibatan yang masih sangat

minim dalam membangun jejaring kemitraan, padahal potensinya besar dalam mendukung promosi dan diseminasi informasi pangan lokal secara luas.

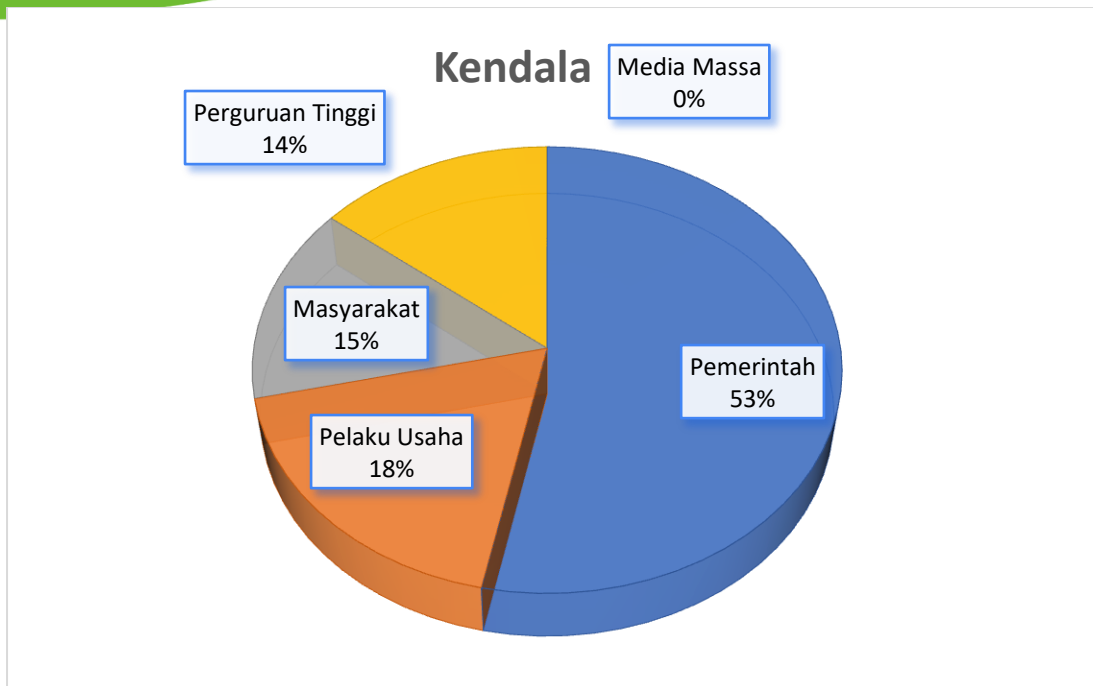


Sumber: data diolah

Gambar IV.13 Luas Kemitraan Stakeholder yang Terlibat dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

5. Hambatan atau Kendala

Dari sisi tantangan, kelompok pemerintah tercatat menghadapi kendala paling banyak (53%) dalam pelaksanaan program penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal dibanding *stakeholder* lain, seperti yang disajikan pada Gambar IV.14. Kendala yang dimaksud bervariasi, mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi, hingga resistensi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan lintas sektor agar hambatan yang dihadapi pemerintah dapat diatasi bersama-sama.



Sumber: data diolah

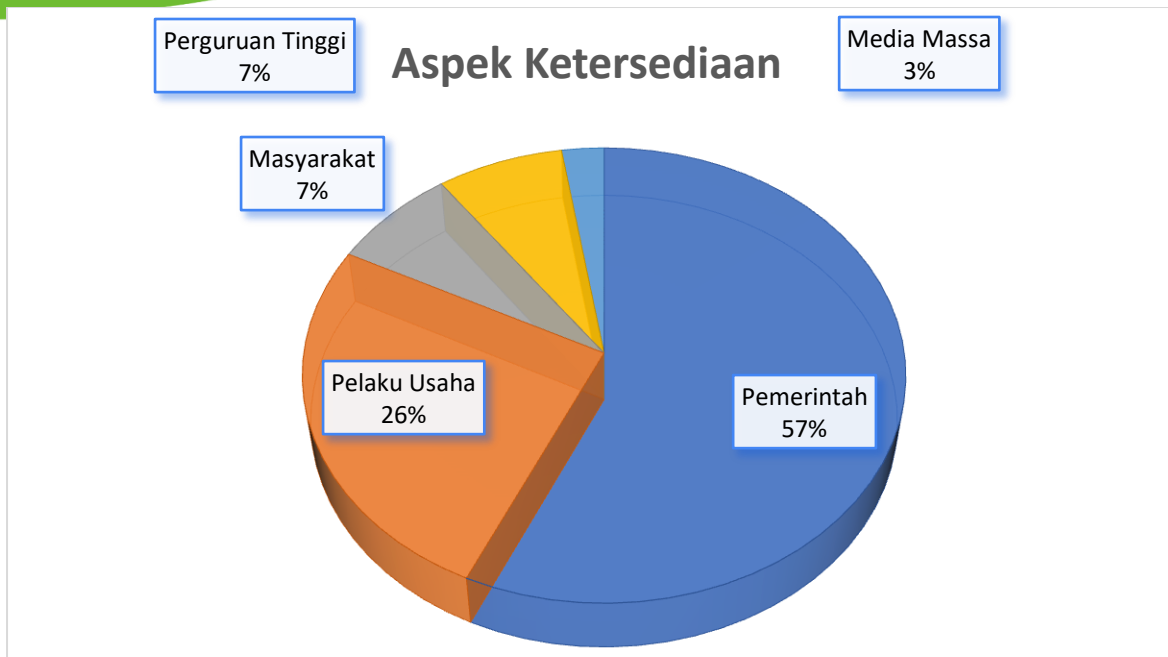
Gambar IV.14 Proporsi Stakeholder yang Menghadapi Kendala dalam Upaya Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

C. Peran Stakeholder Dikaitkan dengan Aspek Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Berdasarkan pengolahan data yang berhasil dikumpulkan, penelitian ini juga memetakan kontribusi stakeholder pada tiga aspek utama penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, yaitu:

1. ketersediaan pangan lokal,
2. pola konsumsi pangan, dan
3. pemenuhan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

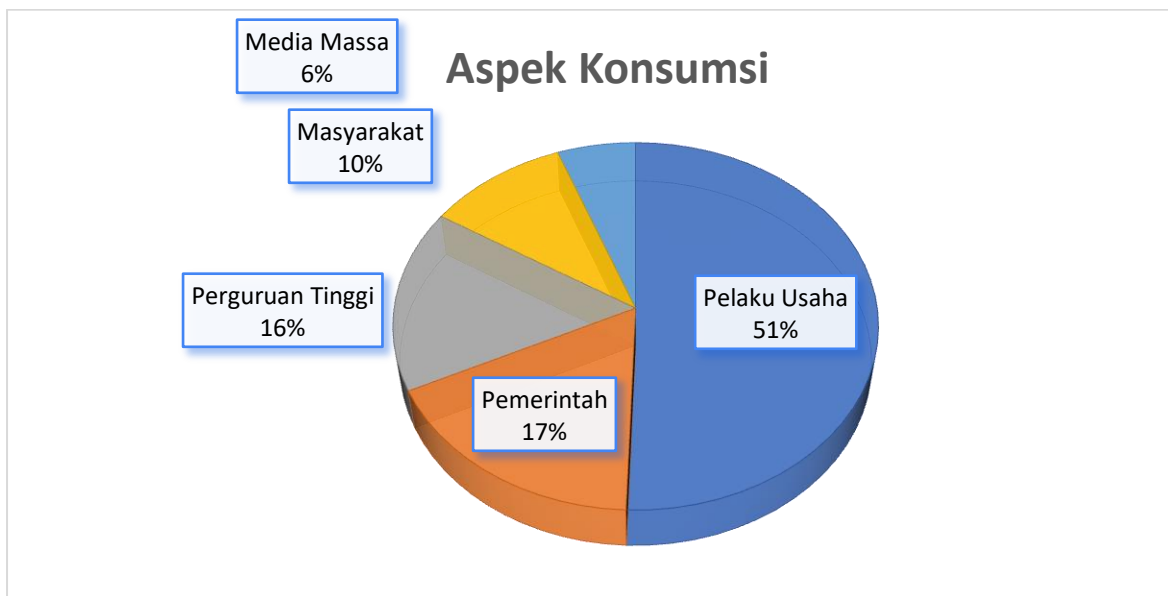
Hasil analisis kode tematik menunjukkan bahwa peran dominan masing-masing stakeholder berbeda pada tiap aspek tersebut. Gambar IV.15, pada aspek ketersediaan, pemerintah memegang peran paling dominan dalam mendorong penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal (misalnya melalui penetapan regulasi pendukung, bantuan sarana dan prasarana, serta pendanaan).



Sumber: data diolah

Gambar IV.15 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Ketersediaan

Sebaliknya, pada aspek konsumsi yang disajikan pada Gambar IV.16, *stakeholder* pelaku usaha (pengusaha pangan olahan) terlihat paling berperan (51%), terutama dalam memengaruhi preferensi konsumen lewat penyediaan produk olahan pangan lokal yang beragam di pasaran.

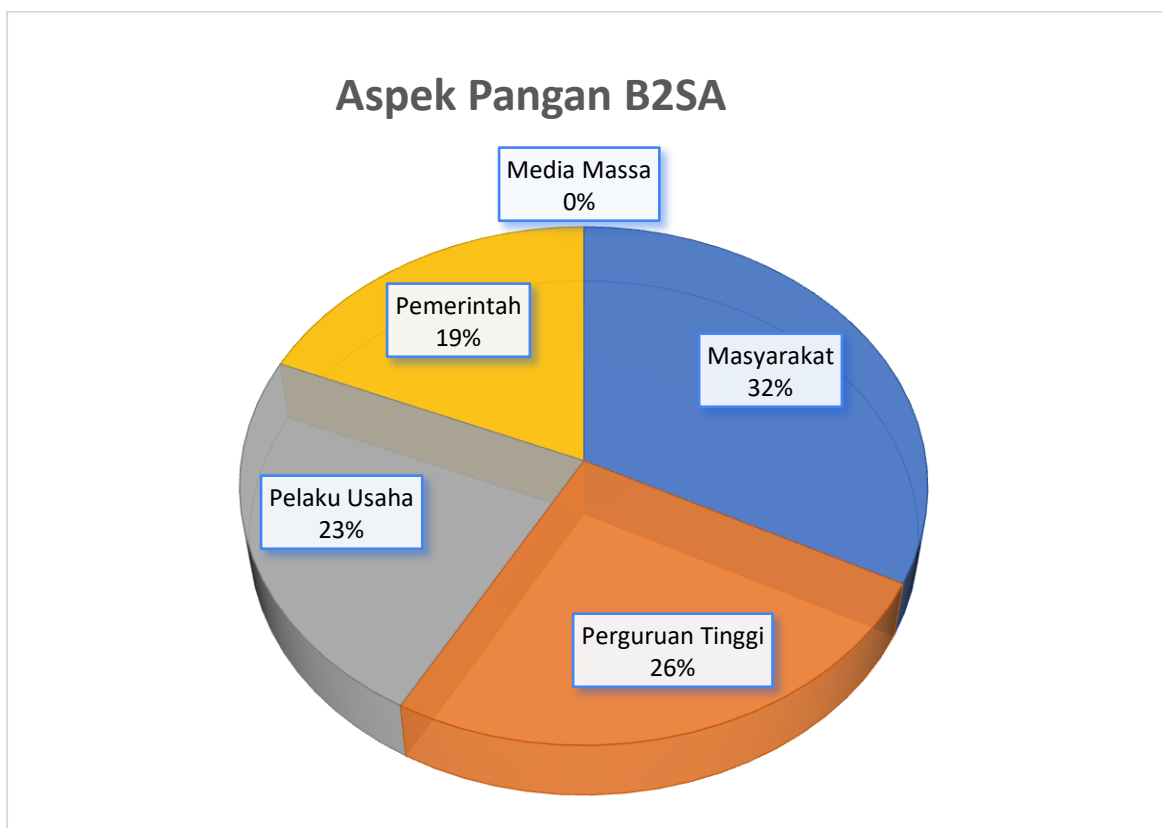


Sumber: data diolah

Gambar IV.16 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Konsumsi

Adapun untuk aspek pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), *stakeholder* dari kelompok masyarakat (termasuk petani atau kelompok tani lokal), merupakan aktor yang kontribusinya paling besar (32%), seperti yang ditunjukkan oleh Gambar IV.17. Dalam hal ini, Hal ini dapat dimengerti karena petani lokal berada di garis depan dalam menyediakan bahan pangan bergizi (seperti sayur, buah, kacang-kacangan) dan memastikan keberlanjutan pasokan pangan sehat bagi masyarakat.

Stakeholder lain juga memiliki proporsi yang cukup merata, seperti perguruan tinggi (26%), pelaku usaha (23%), maupun pemerintah (19%). Ada peluang besar untuk semakin melibatkan *stakeholder* media massa untuk menggencarkan kampanye pangan lokal yang bersifat B2SA melalui sosialisasi, publikasi, dan edukasi ke masyarakat yang merupakan kekuatan utama aktor media massa



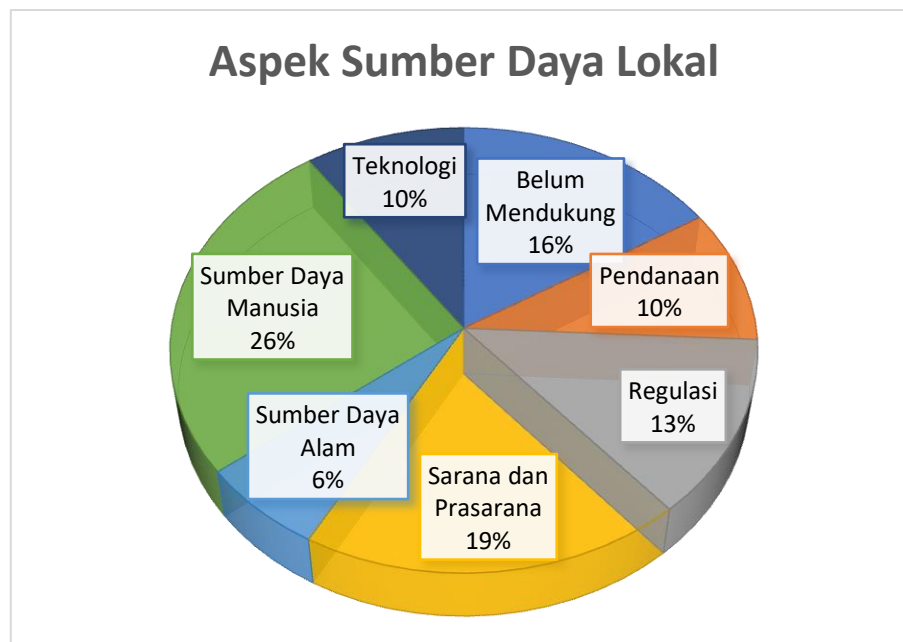
Sumber: data diolah

Gambar IV.17 Proporsi Peran Stakeholder pada Aspek Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Para responden juga menyampaikan persepsi upaya penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Secara umum, mayoritas stakeholder menilai bahwa pemerintah daerah sudah berupaya cukup keras untuk meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan produksi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dari berbagai lini, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar IV.18.

Upaya terbesar yang dirasakan manfaatnya oleh mereka adalah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pangan lokal (26%), mulai dari hulu hingga hilir, melalui kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan sarana dan prasarana (29%), seperti bantuan alat pengolahan, bibit unggul, serta melengkapi regulasi daerah yang menjadi landasan hukum untuk menunjang penganeekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal; langkah-langkah ini dipandang telah memberikan kerangka yang jelas bagi implementasi program.



Sumber: data diolah

Gambar IV.18 Upaya Pemerintah dalam Penganeekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berdasarkan Persepsi Penerima Manfaat

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

1. Kondisi Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Kota Cirebon secara umum cukup, namun belum sepenuhnya stabil pada seluruh kelompok pangan. Pangan pokok seperti beras, ayam, telur, serta sayuran tertentu relatif stabil, tetapi komoditas strategis seperti cabai, ikan, dan bawang masih menunjukkan fluktuasi harga dan pasokan. Ketersediaan pangan lokal berbasis sumber daya pesisir dan pekarangan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung diversifikasi pangan daerah.

2. Pemenuhan Konsumsi Pangan B2SA dan Skor PPH

Konsumsi masyarakat Kota Cirebon masih didominasi makanan berbasis beras dan pangan hewani, sementara konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur, buah, dan pangan lokal lainnya belum mencapai komposisi ideal PPH. Ketidakseimbangan konsumsi ini berdampak pada masih perlunya peningkatan edukasi dan intervensi konsumsi berbasis pangan lokal untuk mewujudkan pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

3. Daya Dukung Wilayah dan Potensi Sumber Daya Lokal

Kota Cirebon memiliki potensi pangan lokal yang signifikan, terutama dari sektor perikanan, UMKM pangan, dan pasokan dari wilayah sekitar (Indramayu, Majalengka, Kuningan). Namun, pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan manajemen pasca panen, minimnya hilirisasi produk lokal, dan belum terintegrasinya teknologi pengolahan serta pengemasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pangan lokal.

4. Upaya, Kebijakan, dan Hambatan Pemerintah

Pemerintah Kota telah melakukan berbagai intervensi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga, serta program edukasi B2SA. Namun upaya tersebut masih bersifat sektoral dan belum terarah pada strategi jangka panjang. Tantangan utama meliputi keterbatasan regulasi khusus pangan lokal, koordinasi lintas PD yang masih lemah, serta keterbatasan dukungan terhadap UMKM dan kelompok masyarakat dalam pengembangan pangan lokal.

5. Peran Stakeholder (Pentahelix)

Hasil analisis peran stakeholder menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran dominan, sementara peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media masih belum optimal. Tingkat keterlibatan dan kemitraan antar-pihak dalam kegiatan panganekaragaman pangan relatif rendah. Padahal, kolaborasi pentahelix sangat diperlukan untuk memperkuat produksi, edukasi, penelitian, promosi, dan pemasaran pangan lokal secara berkelanjutan.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di atas, disusun beberapa rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat dan memperkuat panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kota Cirebon. Rekomendasi difokuskan pada upaya memperkuat ekosistem pangan lokal, mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan pelaku usaha pangan, stabilisasi harga, penguatan regulasi pendukung, serta peningkatan kolaborasi pentahelix. Secara sistematis, rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ekosistem Pangan Lokal Terintegrasi

Mewujudkan sistem pangan daerah yang terhubung dari tahap produksi–pengolahan–distribusi hingga konsumsi, agar pangan lokal tersedia sepanjang tahun dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini mencakup pengembangan logistik rantai pasok dingin, pusat distribusi pangan lokal, serta konektivitas antar pelaku (petani, distributor, konsumen) dalam satu ekosistem terpadu.

2. Meningkatkan Konsumsi Pangan Lokal Non-Beras

Mengalihkan pola konsumsi masyarakat dari beras ke pangan lokal alternatif seperti *umbi-umbian*, kacang-kacangan, ikan lokal, serta aneka sayur dan buah lokal. Edukasi dan kampanye perubahan perilaku gizi perlu digalakkan untuk meningkatkan skor PPH dan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman). Program seperti gerakan “*One Day No Rice*” atau penyediaan menu lokal di kantin/warung dapat dipertimbangkan.

3. Mengoptimalkan Potensi Pangan Pesisir

Memperkuat pemanfaatan sumber daya pesisir (perikanan dan hasil laut) di Cirebon melalui dukungan kepada nelayan lokal, pengembangan teknologi *cold storage* (rantai dingin), dan inovasi olahan ikan yang murah bergizi. Langkah ini

bertujuan menurunkan ketergantungan pada pasokan pangan luar daerah sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas protein hewani lokal.

4. Memperkuat UMKM Pangan Lokal

Mendorong tumbuh-kembang UMKM yang memanfaatkan bahan baku pangan lokal melalui berbagai fasilitasi, antara lain: pelatihan manajemen dan teknis produksi, kemudahan akses permodalan dan kredit usaha, pendampingan untuk sertifikasi keamanan pangan/halal, serta dukungan teknologi pengolahan. UMKM pangan lokal dapat menjadi penggerak utama diversifikasi pangan dan pencipta lapangan kerja di sektor agroindustri.

5. Menjaga Stabilitas Harga Pangan Lokal

Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengendalikan fluktuasi harga pangan lokal. Misalnya melalui kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) secara berkala, pemberian subsidi transportasi distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar, dan membentuk kemitraan antar-daerah (kerjasama regional) untuk saling menyokong pasokan komoditas kunci. Upaya stabilisasi harga ini penting agar petani/produsen lokal mendapatkan harga layak dan konsumen tidak terbebani, sehingga daya beli masyarakat terjaga.

6. Menetapkan Kebijakan Resmi Penggunaan Pangan Lokal

Merumuskan regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota) yang mewajibkan penggunaan bahan pangan lokal dalam berbagai kegiatan dan layanan publik. Contohnya, memastikan menu rapat/asrama pemerintahan menggunakan pangan lokal, mensyaratkan sekolah-sekolah menyediakan kudapan lokal, dan mengintegrasikan pangan lokal dalam program bantuan sosial. Kebijakan ini akan menciptakan permintaan yang konsisten terhadap pangan lokal, memberikan kepastian pasar bagi produsen, dan membudayakan konsumsi pangan lokal di masyarakat.

7. Memperkuat Sinergi *Pentahelix*

Mengoptimalkan peran dan kerjasama lima unsur (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media) dalam setiap tahap pengembangan pangan lokal. Kolaborasi pentahelix perlu diinstitutionalkan, misalnya melalui forum kemitraan pangan daerah atau *task force* lintas sektor. Dengan sinergi tersebut, fungsi masing-masing pihak – pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, akademisi sebagai penyedia kajian dan inovasi, sektor usaha sebagai pelaku utama produksi dan distribusi, komunitas sebagai pelaksana di lapangan dan pengawas

partisipatif, serta media sebagai penyebar informasi dan edukasi – dapat terpadu mendukung diversifikasi pangan lokal dari hulu ke hilir.

Implementasi terpadu dari rekomendasi-rekomendasi di atas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal di Kota Cirebon. Melalui langkah strategis tersebut, kemandirian pangan lokal dapat ditingkatkan, ketergantungan pada bahan pangan luar daerah berkurang, dan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan akan semakin kokoh.

Berikut adalah infografis yang dapat digunakan sebagai instrument dalam sosialisasi.



Gambar V.1 Infografis rekomendasi hasil kajian

DAFTAR PUSTAKA

- Ayala-Orozco, B., Rosell, J. A., Merçon, J., Bueno, I., Alatorre-Frenk, G., Langle-Flores, A., & Lobato, A. (2018). Challenges and Strategies in Place-Based Multi-Stakeholder Collaboration for Sustainability: Learning from Experiences in the Global South. *Sustainability*, 10(9), 3217. <https://doi.org/10.3390/su10093217>
- Badan Pusat Statistik. (2025, December 10). *Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia 2020*. Sensus Penduduk 2020.
- Badan Ketahanan Pangan. (2020). *Pedoman Penyusunan Neraca Bahan Makanan*. Kementerian Pertanian RI.
- Baggio, R., & Fuchs, M. (2018). Network Science and E-tourism. *Information Technology & Tourism*, 20(1–4), 97–102. <https://doi.org/10.1007/s40558-018-0125-8>
- Bappenas. (2015). *Pedoman Umum Pola Pangan Harapan (PPH)*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Basyar, M. R., Mardiyanta, A., & Setijaningrum, E. (2025). Multi-Stakeholder Analysis in Building Tourism Resilience: Collaborative Governance Implementation in the Majapahit House Heritage Area, Indonesia. *Tourism and Hospitality*, 6(1), 5. <https://doi.org/10.3390/tourhosp6010005>
- Bendtsen, E. B., Clausen, L. P. W., & Hansen, S. F. (2021). A Review of the State-of-the-art for Stakeholder Analysis with Regard to Environmental Management and Regulation. *Journal of Environmental Management*, 279, 111773. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111773>
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder Analysis: A Review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.239>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th Editio). John Wiley & Sons.
- Calzada, I. (2020). Democratising Smart Cities? Penta-Helix Multistakeholder Social Innovation Framework. *Smart Cities*, 3(4), 1145–1172. <https://doi.org/10.3390/smartcities3040057>

- Dragomir, C.-C., Foriș, D., Țîțu, A. M., & Foriș, T. (2020). The Role of Intermediaries in Supporting Collaboration for Sustainability: A Model of Commissioning Intervention in the Multi-Stakeholder Collaboration for Sustainable Territorial Development. *Sustainability*, 12(17), 6769. <https://doi.org/10.3390/su12176769>
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Mananda, I. G. P. B. S., Negara, I. M. K., Kristianto, Y., Angligan, I. G. K. H., & Deuchar, C. (2025). From Overtourism to Regeneration: A Penta-Helix Governance Model for Sustainable Tourism in Bali. *Tourism and Hospitality*, 6(5), 240. <https://doi.org/10.3390/tourhosp6050240>
- Marinescu, V., Fox, B., Cristea, D., Roventa-Frumusani, D., Marinache, R., & Branea, S. (2021). Talking about Sustainability: How the Media Construct the Public's Understanding of Sustainable Food in Romania. *Sustainability*, 13(9), 4609. <https://doi.org/10.3390/su13094609>
- Novianti, K. R. (2020). The Penta-helix: A Sustainable Tourism Strategy of Bali's villages. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(03), 125. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i03.10921>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Wang, J., & Ran, B. (2018). Sustainable Collaborative Governance in Supply Chain. *Sustainability*, 10(1), 171. <https://doi.org/10.3390/su10010171>

LAMPIRAN

Instrumen kuisisioner dan wawancara kepada responden Kebutuhan data dan pertanyaan terkait Ketersediaan Pangan

Indikator	2022	2023	2024	Tren	Apakah ada Hambatan? (Ya/Tidak)	Upaya Meningkatkan Skor
Ketersediaan per kapita (% AKE - Angka Kecukupan Energi)	160,0	118,2		Menurun		
Ketersediaan per kapita (% AKP - Angka Kecukupan Protein)	160,8	93,3		Menurun		
Skor PPH Ketersediaan	85,7	86,4		Meningkat		
Produksi Pangan Setempat	N.A	N.A				

Kebutuhan data dan pertanyaan terkait Konsumsi Pangan

Kelompok Pangan	2022	2023	2024	Tren	Apakah ada Hambatan? (Ya/Tidak)	Upaya Meningkatkan Skor
Padi-padian	25,0	25,0	25,0	Stabil		
Umbi-umbian	0,7	0,6	0,6	Cenderung Menurun		
Pangan Hewani	24,0	24,0	24,0	Stabil		
Minyak dan Lemak	4,9	5,0	5,0	Cenderung Naik		
Buah/ Biji Berminyak	0,1	0,1	0,0	Stabil		
Kacang-kacangan	6,8	7,3	7,3	Cenderung Naik		
Gula	1,1	0,8	1,0	Fluktuatif		
Sayur dan Buah	30,0	30,0	30,0	Stabil		
Lain-lain	0,0	0,0	0,0	-		
Total	92,6	92,8	92,58			

Identifikasi Kebutuhan dan Produksi Sumber Jenis Pangan

No.	Kelompok/ Jenis Pangan	Sumber Jenis Pangan Tahun 2024 (dalam satuan Kg/Kapita/Tahun)			
		Kebutuhan	Produksi	Impor	Upaya Peningkatan Produksi (Bia ada)
1.	Padi-Padian				
	Beras			42.750,03	
	Jagung			321,47	
	Terigu			538,63	
2.	Umbi-umbian				
	Singkong			459,51	
	Ubi Jalar			480,91	
	Sagu			-	
	Kentang			3.569,67	
	Umbi Lainnya				
3.	Pangan Hewani				
	Daging Ruminansia			1.120,76	
	Daging Unggas			1.426,94	
	Telur			2.268,73	
	Susu			4.862,64	
	Ikan			757,70	
4.	Minyak dan Lemak				
	Minyak Kelapa			805,71	
	Minyak Lainnya (sawit)			1.993,93	
	Margarin				
5.	Buah/Biji Berminyak				
	Kelapa			-	
	Kemiri			-	
6.	Kacang-kacangan				
	Kacang Kedelai			101,13	
	Kacang Tanah			197,39	
	Kacang Hijau			173,54	
	Kacang lain				
7.	Gula				

No.	Kelompok/ Jenis Pangan	Sumber Jenis Pangan Tahun 2024 (dalam satuan Kg/Kapita/Tahun)			
		Kebutuhan	Produksi	Impor	Upaya Peningkatan Produksi (Bila ada)
	Gula Pasir			1.079,27	
	Gula Merah			496,66	
8.	Sayur dan Buah				
	Sayur			17.643,94	
	Buah			1.592,11	
9.	Lain-lain				
	Minuman				
	Bumbu				

Daftar Pertanyaan Kepada Pentahelix Stakeholder

1. Apakah sudah ada kebijakan secara khusus (Perda/Perwal) terkait penganeekaragaman pangan atau sejenisnya di Kota Cirebon? Sebutkan dan jelaskan.
2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh instansi untuk Penganeekaragaman Pangan, baik dalam bentuk program dan kegiatan? Jelaskan.
3. Siapa saja stakeholder dan masyarakat kelompok tani yang terlibat dalam penganeekaragaman pangan? Bagaimana perannya dari masing-masing stakeholder tersebut? Sebutkan dan jelaskan.
4. Bagaimana bentuk koordinasi lintas sektor dalam kebijakan penganeekaragaman pangan? Jelaskan.
5. Apakah sudah ada peraturan yang mengatur koordinasi lintas sektor? Sebutkan.
6. Apakah terdapat Dewan Pangan Daerah Kota Cirebon? Jelaskan.
7. Apa saja sumber daya (*resources*) yang sudah dimiliki instansi dalam mengelola penganeekaragaman pangan?
8. Apa saja infrastruktur dan sumber daya yang belum tersedia dalam mendukung penganeekaragaman pangan lokal?
9. Apakah ada kegiatan sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA? Dimanakah lokasi dan berapa kali intensitas sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan?
10. Apakah ada kegiatan monitoring dan evaluasi penganeekaragaman pangan? Berapa kali intensitas monev tersebut dilakukan? Sebutkan.
11. Apakah ada pencantuman kebijakan/program/kegiatan terkait penganeekaragaman pangan dalam rencana pembangunan daerah?
12. Sejauhmana dukungan anggaran dan sumber daya dalam rencana pembangunan daerah?

13. Apakah ada sinkronisasi pengalokasian lahan pertanian dalam rencana tata ruang di Kota Cirebon?
14. Apakah ada hambatan dalam upaya penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal? Bila ada, jelaskan hambatan tersebut.
15. Apakah aspek berikut menjadi tantangan dalam penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal?

No.	Aspek	Tantangan (Ya/Tidak)	Jelaskan (bila ada)
1	Alih fungsi lahan pertanian yang drastis menjadi permukiman dan Kawasan industri		
2	Preferensi masyarakat yang masih dominan konsumsi beras		
3	Rendahnya kesadaran konsumsi pangan beragam di masyarakat		
4	Kurang optimalnya regenerasi petani		
5	Keterbatasan lahan produksi pangan lokal		
6	Perubahan iklim		
7	Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat		
8	Sinkronisasi dalam rencana pembangunan dan tata ruang		
9	Dinamika sosial ekonomi masyarakat		
10	Ketersediaan dan akses terhadap lahan produksi pangan		
11.	Fluktuasi harga pangan yang harus dihadapi oleh pelaku kebijakan dan masyarakat		
12	Fluktuasi distribusi pangan yang harus dihadapi oleh pelaku kebijakan dan masyarakat		

No.	Aspek	Tantangan (Ya/Tidak)	Jelaskan (bila ada)
13	Lainnya:		

I. KETERSEDIAAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya pemerintah Kota Cirebon dalam peningkatan ketersediaan pangan lokal? Sebutkan dan jelaskan
2. Apabila mengetahui, apa saja bentuk peran/kontribusi Instansi Bapak/Ibu dalam menyukseskan program/kegiatan peningkatan ketersediaan pangan lokal?
3. Apakah Instansi Bapak/Ibu secara khusus pernah dilibatkan dalam koordinasi/diskusi/forum program/kegiatan tersebut?
4. Siapa saja mitra Instansi Bapak/Ibu dalam peran dalam program/kegiatan peningkatan ketersediaan pangan lokal?
5. Apakah ada kendala dan tantangan, dalam peran Instansi Bapak/Ibu tersebut?

II. KONSUMSI

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan lokal? Sebutkan dan jelaskan
2. Apabila mengetahui, apa saja bentuk peran/kontribusi Instansi Bapak/Ibu dalam menyukseskan program/kegiatan pola konsumsi pangan?
3. Apakah Instansi Bapak/Ibu secara khusus pernah dilibatkan dalam koordinasi/diskusi/forum program/kegiatan tersebut?

4. Siapa saja mitra Instansi Bapak/Ibu dalam peran dalam program/kegiatan pola konsumsi pangan?

5. Apakah ada kendala dan tantangan, dalam peran Instansi Bapak/Ibu tersebut?

III. B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui upaya pemerintah Kota Cirebon dalam program/kegiatan pangan BS2A? Sebutkan dan jelaskan

2. Apabila mengetahui, apa saja bentuk peran/kontribusi Instansi Bapak/Ibu dalam menyukseskan program/kegiatan pangan BS2A?

3. Apakah Instansi Bapak/Ibu secara khusus pernah dilibatkan dalam koordinasi/diskusi/forum program/kegiatan tersebut?

4. Siapa saja mitra Instansi Bapak/Ibu dalam peran dalam program/kegiatan pangan BS2A?

5. Apakah ada kendala dan tantangan, dalam peran Instansi Bapak/Ibu tersebut?

IV. SUMBER DAYA LOKAL

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, sejauhmana pemerintah kota cirebon dalam upaya peningkatan penganeekaragaman pangan yang didukung dan memanfaatkan sumber daya lokal?



BAPPELITBANGDA KOTA CIREBON

Jalan Monumen No. 1 Kota Cirebon

Telp. (0231) 203588

E-mail: bappelitbangda@cirebonkota.go.id

Website : bappeda.cirebonkota.go.id